



# RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) Tahun 2020 - 2024



Dinas Penanaman Modal,  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt, Atas segala limpahan Rahmat Nikmat dan Karunianya maka RENSTRA Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) ini dibuat dalam rangka mewujudkan goodgovernment yaitu terselenggaranya manajemen pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, dan merupakan terobosan dalam pembangunan terutama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional pada masyarakat dan dunia usaha di Bidang Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Mempawah sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan RENSTRA ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi Peningkatan Kinerja Pemerintah dan Pembangunan, khususnya Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

Mempawah, 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MEMPAWAH

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah

  
NURMALA, SH, M.Si  
NIP. 19680522 1094002006

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	
1.2. Landasan Hukum .....	
1.3. Maksud dan Tujuan .....	
1.4. Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>22</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	30
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>45</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	45
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB VIII : PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR BAGAN DAN TABEL**

2.1.	Struktur Organisasi DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah .....	14
2.2.	PNS DPMKUKMPTSP Berdasarkan Eselon .....	16
2.3.	PNS DPMKUKMPTSP Berdasarkan Golongan Tingkat Pendidikan .....	16
2.4.	Sarana dan Prasarana DPMKUKMPTSP .....	17
2.5.	Pencapaian Kinerja DPMKUKMPTSP (2015-2016) s/d Sekarang .....	<b>22</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	47
5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	62
6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	67
7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	68



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150.

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah merupakan bagian dari Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah difokuskan pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Mempawah 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu



Satu Pintu Kabupaten Mempawah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku, Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-



Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Menteri Dalam Negeri Nomor **050-5889 Tahun 2021** Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
13. 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
15. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2020- 2025.
16. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024.





### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan dalam rangka melaksanakan program yang di rencanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi SKPD.

Selain itu, Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah disusun sesuai dengan alur pikir penyusunan Renstra, mengarahkan tujuan dan sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan, sehingga dapat di implementasikan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan seluruh strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah.

Renstra SKPD disusun bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah sehingga dapat membantu mempercepat proses peningkatan kinerja pelayanan publik yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.
2. Untuk menjamin komitmen bersama Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati.
3. Untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan Tahunan Instansi.



4. Menjadi alat pengendali dan monitoring dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta sebagai salah satu bahan untuk tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut

#### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II**

##### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV

#### TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### BAB V

#### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII

#### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII

#### PENUTUP

#### LAMPIRAN



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 44 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 dan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantu di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud diatas, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi :

- (1) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan secara Terpadu dengan prinsip Koordinasi, Intergrasi, Sinkronisasi, Simflikasi dan Keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menyelenggarakan fungsi:



- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- b. Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang Penanaman Modal dan proses Pelayanan Perizinan.
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal.
- e. Penyelenggaraan Perizinan.
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- g. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah terdiri dari 2 Sub Bagian dan 3 Bidang dan 6 Seksi yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Aparatur
2. Sub Bagian Perencanaan & Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal
  - a. Seksi Kerjasama dan Promosi
  - b. Seksi Pendataan dan Pengendalian
4. Bidang Koperasi & UKM
  - a. Seksi Koperasi
  - b. Seksi Usaha kecil dan Menengah



5. Bagian Perizinan dan Non Perizinan
  - a. Seksi Pendaftaran dan Pemberkasan
  - b. Seksi Penetapan dan Pengaduan

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Sub bagian dan Seksi tersebut adalah sebagai berikut:

**1). Fungsi Sub Bagian Umum dan Aparatur**

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
- c. Pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan.
- d. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga dinas.
- e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum dan aparatur.
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur.
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

**2). Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas.
- c. Penyiapan dan pengelolaan bahan penyusunan rencana anggaran.
- d. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Dinas.
- e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan.
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris

**3). Fungsi Bidang Penanaman Modal**

- a. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal.



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Penanaman Modal.
  - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Penanaman Modal.
  - d. Pengelolaan dan pelayanan umum di Bidang Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- a). Fungsi Seksi Kerjasama dan Promosi Bidang Penanaman Modal**
- a. Penyusunan program kerja Seksi Kerjasama dan Promosi.
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di seksikerjasama dan promosi.
  - c. Penyiapan bahan koordinasi di seksikerjasama dan promosi.
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di seksikerjasama dan promosi.
  - e. Penyiapan bahan kebijaksanaan teknis dan pengembangan penanaman modal daerah.
  - f. Pengelolaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah dan Kerjasama.
  - g. Pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama.
  - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di seksi kerjasama dan promosi.
  - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.
- b). Fungsi Seksi Pendataan dan Pengendalian Bidang Penanaman Modal**
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Pengendalian.
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di seksi Pendataan dan Pengendalian.
  - c. Penyiapan bahan koordinasi di seksi Pendataan dan Pengendalian.
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di seksi Pendataan dan Pengendalian.
  - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan dan pengendalian perjanjian kerjasama.



- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan dan pengendalian di seksi Pendataan dan Pengendalian.
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di seksi Pendataan dan Pengendalian.
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

**4). Fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Penyusunan Program Kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Pengembangan usaha dan kelembagaan Koperasi dan UMKM.
- f. Pelaksanaan promosi UMKM.
- g. Pelaksanaan pengelolaan modal UMKM.
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

**a). Fungsi Seksi Koperasi**

- a. Penyusunan program kerja seksi koperasi.
- b. Pengumpulan/pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi koperasi.
- c. Penyiapan bahan koordinasi di seksi koperasi.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di seksi koperasi.
- e. Penyiapan bahan konsultasi pengembangan usaha dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.





- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan permodalan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga keuangan koperasi.
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di seksi koperasi.
- i. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**b). Fungsi Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Penyusunan program kerja Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Penyiapan bahan koordinasi di seksi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di diseksi Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil menengah.
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di seksi Usaha Kecil dan Menengah.
- g. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**5). Fungsi Bidang Perizinan dan Non Perizinan**

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- d. Pelaksanaan pelayanan pemberian pertimbangan penerbitan perizinan.
- e. Pemantauan pelaksanaan pelayan perizinan.
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



**a). Fungsi Seksi Pendaftaran dan Pemberkasan**

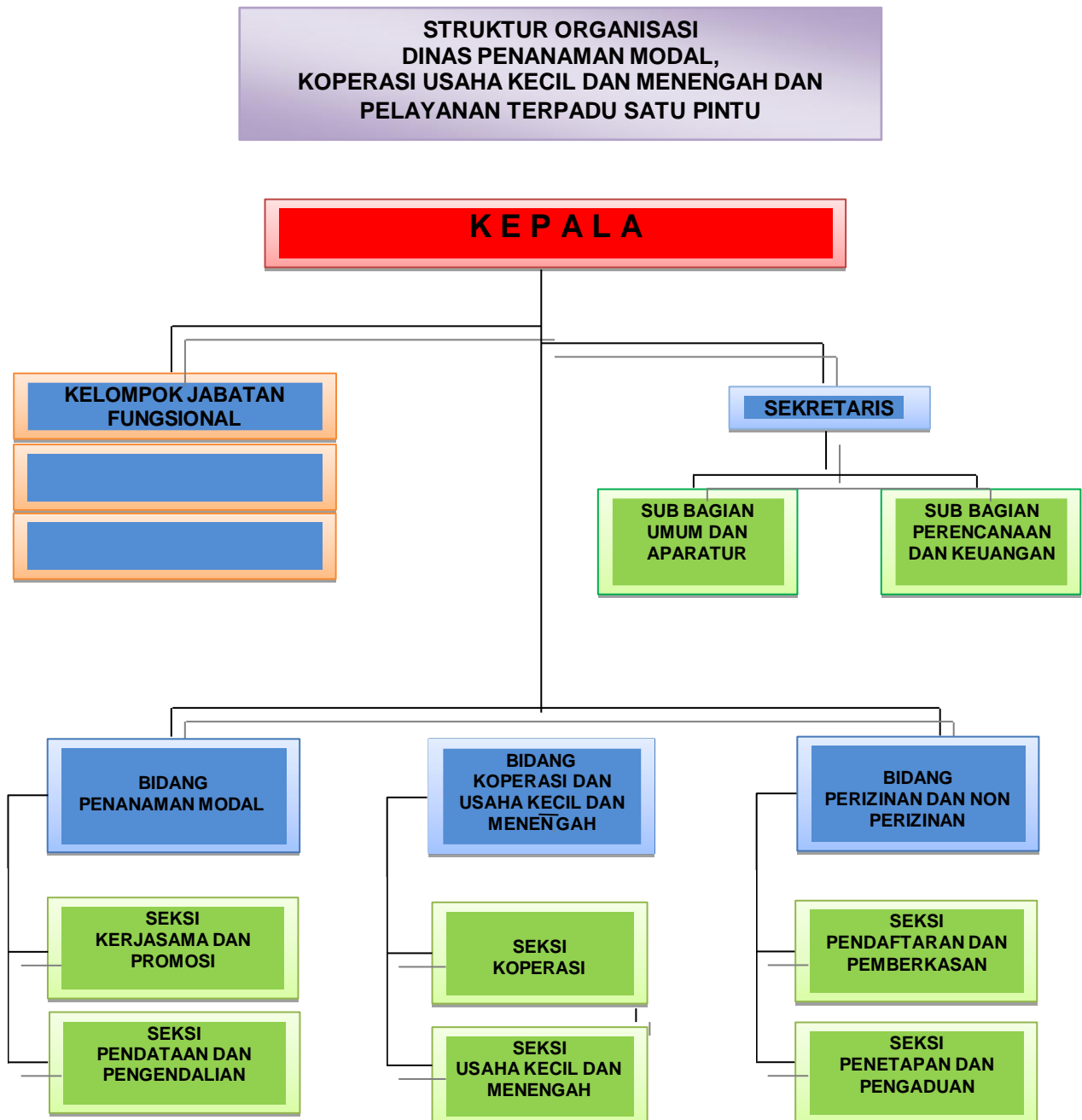
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pendaftaran dan Pemberkasan.
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi teknis di Bidang Pendaftaran dan Pemberkasan.
- c. Penyiapan bahan koordinasi di seksi Pendaftaran dan Pemberkasan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di seksi Pendaftaran dan Pemberkasan.
- e. Pelaksanaan pelayanan pemberian blanko pendaftaran perizinan.
- f. Pelaksanaan pelayanan pemberkasan persyaratan perizinan.
- g. Pemantauan pelayanan pendaftaran dan pemberkasan perizinan.
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di seksi Pendaftaran dan Pemberkasan.
- i. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

**b). Fungsi Seksi Penetapan dan Pengaduan**

- a. Penyusunan program kerja seksi penetapan dan pengaduan.
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi penetapan dan pengaduan.
- c. Penyiapan bahan koordinasi di seksi penetapan dan pengaduan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di seksi penetapan dan pengaduan.
- e. Pelaksanaan pelayanan pemberian pertimbangan penetapan perizinan.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelayanan pengaduan masyarakat.
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyampaian informasi perizinan dan non perizinan.
- h. Pelaksanaan pengkajian prosedur perizinan dan non perizinan.
- i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di seksi penetapan dan pengaduan.

- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

Bagan 2.1





## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, merupakan unsur penunjang Daerah di Bidang Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu. Pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang di tempatkan di DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah berjumlah 24 Orang (dua puluh empat orang) dengan masing – masing mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Adapun Sumber daya Aparatur Pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten mempawah terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Sub Bagian Umum dan Aparatur
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 5) Bidang Penanaman Modal
- 6) Bidang Koperasi dan UKM
- 7) Bidang Perizinan dan Non Perizinan
- 8) Seksi Kerjasama dan promosi
- 9) Seksi Pendataan dan Pengendalian
- 10) Seksi Koperasi
- 11) Seksi Usaha Kecil dan Menengah
- 12) Seksi Pendaftaran dan Pemberkasan
- 13) Seksi Penetapan dan Pengaduan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 5



(lima) orang, Golongan III sebanyak 18 (delapan belas) orang dan Golongan II sebanyak 3 (tiga) orang. Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2  
Data PNS DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah  
Berdasarkan Eselon

No	Eselon/Non Eselon	Golongan			
		I	II	III	IV
1	II	-	-	-	1
2	III	-	-	-	4
3	IV	-	-	8	0
<b>Sub Jumlah</b>		-	-	<b>8</b>	<b>5</b>
3	Non Eselon	-	3	7	-
<b>Jumlah</b>		-	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>4</b>

Sumber : Data DUK Tahun 2020

Tabel 2.3  
Data PNS DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	3
2.	S 1	17
3.	D 3	0
4.	D 1	0
5.	SMA	5
6.	SMP	0
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

Sumber : Data DUK Tahun 2020



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme melalui berbagai pelatihan yang terkait.

Adapun Pegawai yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Sebanyak 17 orang. Diklat/Bimtekyang telah diikuti sebagai berikut :

- 15 orang sudah mengikuti Diklat PTSP bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama,
- 6orang sudah mengikuti Diklat PTSP bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan,
- 6orang sudah mengikuti Diklat PTSP bidang Penanaman Modal Tingkat Sektoral,
- 6 Orang, sudah mengikuti Bimbingan Tehnis OSS,
- 1orang sudah mengikuti Diklat PTSP bidang Penanaman Modal Tingkat SPIPISE,
- 4 orang sudah mengikuti Diklat Peningkatan Pemahaman Perkoperasian bagi aparatur daerah.

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenMempawah didukung sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan kantor sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Data Sarana dan Prasarana DPMKUKMPTSP**

No	Sarana dan Pra Sarana	Jumlah	Keadaan
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	1 Bh	Baik
2	Mobil Jabatan	1 Bh	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda Dua	5 Bh	Baik
4	Meja Rapat	2 Set	Baik
5	Kursi Tunggu / Kursi Besi	6Bh	Baik
6	Filing Kabinet	7Bh	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Ess.II	1Bh	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Esselon	12 Bh	Baik
9	Kursi Kerja Pejabat Esselon	13Bh	Baik
10	Kursi Kerja Non Struktural	102 Bh	Baik
11	Meja Kerja Non Struktural	48 Bh	Baik



12	Komputer PC	10 Unit	Baik
13	Lap Top	4Bh	Baik
14	Komputer Monitor Touch Scren	1Bh	Baik
15	Mesin Hitung	1 Bh	Rusak
16	Mesin Absensi	1 Bh	Rusak
17	Pompa Air	0Bh	Baik
18	Lemari Arsip Kayu	8Unit	Baik
19	Lemari Arsip Besi	1 Bh	Baik
20	Printer Epson LQ-2180	1 Bh	Baik
21	Jaringan Online	0Bh	Baik
22	Server Mikrotik	1 Unit	Baik
23	Printer	6 Buah	Baik
24	AC Standing	3 Buah	Baik
25	AC Split	15 Buah	Baik
26	Kamera Digital	2 Buah	Baik

Sumber : Data Inventaris Aset Tahun 2020

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk untuk melaksanakan mandat Pemerintah Pusat dalam hal kemudahan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam proses penerbitan perizinan dan membentuk PTSP Kabupaten/Kota sebagai penyelaras ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik seperti pasal 25 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Permendagri 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Penyelenggaraan Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan PTSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapastian pelayanan. Melalui pelayanan ini diharapkan akan terwujud



pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **1. Bidang Penanaman Modal**

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“**PERKA BKPM 17/2015**”), yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 2015. PERKA BKPM ini mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3 Tahun 2012.

#### **a. Tantangan**

1. Masih kurangnya efektifitas promosi dan kerjasama daerah di bidang penanaman modal serta informasi potensi sumber daya dan peluang investasi serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membuat izin dalam pengelolaan suatu usaha. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya informasi, potensi sumber daya dan peluang investasi yang berakibat kurangnya minat untuk berinvestasi bagi penanaman modal, dan masih rendah kesadaran masyarakat yang berusaha untuk membuat izin hal ini berpengaruh pada realisasi penerbitan izin yang pada akhirnya berpengaruh dalam pendapatan asli daerah. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa membuat izin adalah suatu beban biaya yang tinggi dan birokrasi yang berbelit-belit.
2. Lemahnya penerapan sanksi hukum bagi pengusaha dan aparat karena belum lengkapnya produk hukum yang mengatur sanksi tersebut.
3. Kurangnya promosi dan pengenalan daerah yang berpotensi untuk menarik investasi PMA dan PMDN serta informasi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal yang cepat, sederhana transparan tanpa pungutan biaya melalui pelayanan terpadu.

#### **b. Peluang**





Pemanfaatan teknologi yang berkembang, perkembangan teknologi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi, ahli teknologi dan pemanfaatan teknologi.

## **2. Bidang Koperasi dan UKM**

### **a. Tantangan**

1. Rendahnya kualitas kelembagaan SDM Koperasi.
2. Produk Koperasi UMKM kurang berdaya saing dan tidak berkesinambungan.
3. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknis dibidang produksi manajemen usaha dan kewirausahaan.
4. Rendahnya kemampuan Koperasi UMKM dalam memproduksi produk
5. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan, kredit perbankan dan pemasaran
6. Masih belum optimalnya pengetahuan terhadap pengelola di bidang Koperasi

### **b. Peluang**

Adanya peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM melalui revitalisasi pemeringkatan, advokasi, pengkajian, pelatihan pemerintah.

1. Peningkatan pelatihan daya saing produk melalui diklat bagi pengelola Koperasi dan UMKM.
2. Mengikutsertakan hasil produk Koperasi dan UMKM dalam berbagai expo/pameran baik dalam daerah atau luar daerah.
3. Menyediakan/menginformasikan terhadap akses sumber pembiayaan, kredit perbankan dan pemasaran produk.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan pengelolaan Koperasi dan UMKM.

## **3. Bidang Perizinan dan Non Perizinan**

### **a. Tantangan**

1. Memberikan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, cepat dan non diskriminasi.



2. Meningkatkan pelayanan publik dengan konsep *easy off doing business* (kemudahan dalam melakukan usaha) yang berdaya saing dalam memberikan pelayanan publik.

**b. Peluang**

Menjadikan bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagai barisan kedepan dalam memberikan pelayanan publik yang bersih, akuntabel cepat dan non diskriminasi yang didukung dengan penguasaan Teknologi Informasi.

Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah PMA dan PMDN yang menanamkan modal		PMDN : 12 PMA : 7	PMDN : 12 PMA : 7	PMDN:58 PMA:35	PMDN:59 PMA:31	PMDN:15 PMA:12	PMDN:15 PMA:12	PMDN:20 PMA:10	PMDN:42 PMA:16	PMDN:58 PMA:35	PMDN:58 PMA:35	PMDN:31 PMA:23	PMDN:103 PMA:40	58,5	105	338,5	198,5	457,5
2.	Realisasi Investasi PMA dan PMDN		482.130.000.000	482.130.000.000	3.020.000.000.000	2.190.000.000.000	1.180.070.000	482.130.000.000	400.000.000.000	3.190.000.000.000	244.000.000.000	2.383.090.000	594.053.000.000	431.778.400.000	105	11	201	123	107
3.	Jumlah Koperasi yang berbadan hukum		234	234	0	0	231	234	234	0	0	229	232	242	0	0	99	99	103
4.	Jumlah Koperasi dan UKM yang aktif		3.089	3.089	0	0	3.089	3.089	3.089	0	0	2.965	2.948	2.311	0	0	95	95	74
5.	Jumlah Koperasi dan UKM yang menjalankan usaha dengan mandiri		3.089	3.089	0	0	3.089	3.089	3.089	0	0	2.814	2.948	2.311	0	0	91	95	74
6.	Jumlah pertambahan Koperasi dan UKM		212	212	0	0	106	106	71	0	0	98	71	66	0	0	92	65	92
7.	Jumlah izin yang diterbitkan		9.000 Izin	9.000 Izin	3.000 Izin	3.000 Izin	3.000 Izin	3.000 Izin	2.500 Izin			2.408 Izin	2.233	1.108			80	74	44
8.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100	100	100	100	98
9.	Indek Kepuasan Masyarakat		90 Nilai	90 Nilai	90 Nilai	85 Nilai	90 Nilai	90 Nilai	100 Nilai			80,73 Nilai	0 Nilai	81.05 Nilai			89,7	0	81,05

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio anantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015 (2) (Rp)	2016 (3) (Rp)	2017 (4) (Rp)	2018 (5) (Rp)	2019 (6) (Rp)	2015 (7) (Rp)	2016 (8) (Rp)	2017 (9) (Rp)	2018 (10) (Rp)	2019 (11) (Rp)	2015 (12) (Rp)	2016 (13) (Rp)	2017 (14) (Rp)	2018 (15) (Rp)	2019 (16) (Rp)	Anggaran (17) (Rp)	Realisasi (18) (Rp)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan konsultasi pelayanan perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan standar pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring dan evaluasi perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitas peningkatan kualitas perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>160,000,000</b>	<b>154,597,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>150,251,000</b>	<b>84,982,000</b>	<b>159,720,036</b>	<b>154,304,130</b>	<b>246,092,501</b>	<b>149,864,300</b>	<b>84,865,300</b>	<b>99.83</b>	<b>99.81</b>	<b>98.44</b>	<b>99.74</b>	<b>99.86</b>		
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	-	-	10,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	10,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	100.00	100.00	100.00		
Dukungan Pelayanan Terpadu	160,000,000	154,597,000	60,000,000	88,501,000	71,982,000	159,720,036	154,304,130	59,872,501	88,354,300	71,865,300	99.83	99.81	99.79	99.83	99.84		
Koordinasi dan konsultasi pelayanan perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	-	-	180,000,000	48,750,000	-	-	-	176,220,000	48,510,000	-	-	-	97.90	99.51	-		
Mengintesisifkan penanganan pengaduan masyarakat	49,007,000	49,007,000	29,007,000	49,410,150	67,955,500	48,828,769	48,890,568	28,153,400	49,217,500	67,697,220	99.64	99.76	97.06	99.61	99.62		
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	10,936,000	-	-	-	-	10,936,000	-	-	-	-	100.00		
Pengendalian pelayanan terpadu	14,007,000	14,007,000	14,007,000	14,508,000	18,530,500	13,968,390	13,986,782	13,202,900	14,494,500	18,375,015	99.72	99.86	94.26	99.91	99.16		
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	15,000,000	15,000,000	15,000,000	9,389,000	10,062,000	14,941,505	14,947,425	14,950,500	9,289,000	10,062,000	99.61	99.65	99.67	98.93	100.00		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Sosialisasi pelayanan Terpadu	20,000,000	20,000,000	-	25,513,150	28,427,000	19,918,874	19,956,361	-	25,434,000	28,324,205	99.59	99.78	-	99.69	99.64		
Penanganan pengaduan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>213,563,000</b>	<b>235,723,000</b>	<b>548,017,000</b>	<b>501,942,500</b>	<b>616,799,500</b>	<b>201,777,878</b>	<b>202,710,869</b>	<b>503,034,550</b>	<b>492,224,449</b>	<b>558,648,407</b>	<b>94.48</b>	<b>86.00</b>	<b>91.79</b>	<b>98.06</b>	<b>90.57</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	70,000,000	105,000,000	220,000,000	152,000,000	269,500,000	58,261,325	72,252,855	181,592,698	143,291,247	212,221,341	83.23	68.81	82.54	94.27	78.75		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	825,000	955,400	1,095,600	1,256,200	100.00	82.50	47.77	54.78	62.81		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,375,000	12,375,000	12,375,000	12,375,000	12,149,500	12,374,600	12,375,000	12,375,000	12,375,000	12,149,500	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,042,000	17,042,000	137,042,000	138,967,500	138,552,500	17,041,000	17,042,000	131,641,400	138,887,500	138,552,300	99.99	100.00	96.06	99.94	100.00		
Penyediaan Instalasi Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung Kantor	3,122,500	3,122,500	5,000,000	5,000,000	4,997,500	3,122,500	3,122,500	4,969,000	5,000,000	4,997,400	100.00	100.00	99.38	100.00	100.00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-		
Penyediaan Makan dan Minum Kantor	7,200,000	9,360,000	35,000,000	20,000,000	20,500,000	7,200,000	9,360,000	34,995,000	20,000,000	20,500,000	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	65,000,000	50,000,000	60,000,000	95,000,000	95,000,000	64,954,953	49,910,014	59,906,052	94,975,102	94,996,866	99.93	99.82	99.84	99.97	100.00		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	19,875,000	100.00	100.00	100.00	100.00	99.38		
Jasa Pendukung Keamanan dan Ketertiban Kantor	14,400,000	14,400,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	14,400,000	14,400,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	3,823,500	3,823,500	28,000,000	28,000,000	28,000,000	3,823,500	3,823,500	28,000,000	28,000,000	27,999,800	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>85,361,000</b>	<b>66,024,000</b>	<b>662,071,000</b>	<b>320,913,500</b>	<b>937,701,000</b>	<b>84,857,742</b>	<b>65,912,155</b>	<b>661,420,484</b>	<b>320,575,900</b>	<b>827,009,000</b>	<b>99.41</b>	<b>99.83</b>	<b>99.90</b>	<b>99.89</b>	<b>88.20</b>		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio anantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015 (2) (Rp)	2016 (3) (Rp)	2017 (4) (Rp)	2018 (5) (Rp)	2019 (6) (Rp)	2015 (7) (Rp)	2016 (8) (Rp)	2017 (9) (Rp)	2018 (10) (Rp)	2019 (11) (Rp)	2015 (12) (Rp)	2016 (13) (Rp)	2017 (14) (Rp)	2018 (15) (Rp)	2019 (16) (Rp)	Anggaran (17) (Rp)	Realisasi (18) (Rp)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30,000,000	8,000,000	290,275,000	-	15,820,000	29,700,000	8,000,000	290,135,000	-	15,820,000	99.00	100.00	99.95	-	100.00		
Pembangunan Garasi	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	99,919,500	-	-	-	-	99.92		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	-	72,000,000	621,000,000	-	-	-	71,850,000	510,500,000	-	-	-	99.79	82.21		
Pengadaan Meubler	-	7,500,000	178,425,000	66,542,500	-	-	7,500,000	178,425,000	66,542,500	-	-	100.00	100.00	100.00	-		
Pengadaan Personal Komputer	-	5,403,000	27,000,000	110,000,000	123,000,000	-	5,403,000	26,700,000	109,850,000	123,000,000	-	100.00	98.89	99.86	100.00		
Pengadaan Alat Studio dan Telekomunikasi	-	-	114,500,000	8,500,000	-	-	-	114,500,000	8,500,000	-	-	-	100.00	100.00	-		
Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor	10,000,000	10,000,000	-	12,000,000	12,000,000	9,998,800	9,997,700	-	12,000,000	12,000,000	99.99	99.98	-	100.00	100.00		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	22,861,000	22,861,000	22,861,000	22,861,000	22,861,000	22,838,942	22,831,455	22,833,384	22,827,450	22,814,500	99.90	99.87	99.88	99.85	99.80		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7,500,000	7,260,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,380,000	7,210,000	9,825,000	10,000,000	10,000,000	98.40	99.31	98.25	100.00	100.00		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Operasional	-	-	14,010,000	14,010,000	28,020,000	-	-	14,002,100	14,005,950	27,955,000	-	-	99.94	99.97	99.77		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	14,940,000	4,970,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	99.60	99.40	100.00	100.00	100.00		
<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>10,170,000</b>	<b>10,170,000</b>	<b>26,595,000</b>	<b>23,310,000</b>	<b>25,810,000</b>	<b>10,170,000</b>	<b>9,785,000</b>	<b>16,810,000</b>	<b>23,310,000</b>	<b>25,375,000</b>	<b>100.00</b>	<b>96.21</b>	<b>63.21</b>	<b>100.00</b>	<b>98.31</b>		
Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10,170,000	10,170,000	26,595,000	23,310,000	25,810,000	10,170,000	9,785,000	16,810,000	23,310,000	25,375,000	100.00	96.21	63.21	100.00	98.31		
<b>Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>40,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>37,500,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>38,756,800</b>	<b>24,987,000</b>	<b>29,925,000</b>	<b>54,999,503</b>	<b>34,920,206</b>	<b>96.89</b>	<b>99.95</b>	<b>79.80</b>	<b>99.999</b>	<b>99.772</b>		
Sosialisai	40,000,000	25,000,000	37,500,000	55,000,000	35,000,000	38,756,800	24,987,000	29,925,000	54,999,503	34,920,206	96.89	99.95	79.80	99.999	99.772		
<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>25,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>37,500,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>24,851,900</b>	<b>34,925,000</b>	<b>37,275,000</b>	<b>49,966,000</b>	<b>59,840,500</b>	<b>99.41</b>	<b>99.79</b>	<b>99.40</b>	<b>99.93</b>	<b>99.73</b>		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	12,000,000	12,000,000	12,000,000	15,000,000	15,000,000	11,892,300	11,934,000	12,000,000	15,000,000	14,949,600	99.10	99.45	100.00	100.00	99.66		
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,969,700	4,993,000	4,990,000	4,982,000	4,958,550	99.39	99.86	99.80	99.64	99.17		
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8,000,000	8,000,000	10,500,000	15,000,000	15,000,000	7,989,900	7,999,000	10,500,000	14,995,000	14,983,350	99.87	99.99	100.00	99.97	99.89		
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	-	10,000,000	10,000,000	15,000,000	25,000,000	-	9,999,000	9,785,000	14,989,000	24,949,000	-	99.99	97.85	99.93	99.80		
<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>3,593,600</b>	<b>3,579,600</b>	<b>7,495,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,498,950</b>	<b>99.82</b>	<b>99.43</b>	<b>99.93</b>	<b>100.00</b>	<b>99.99</b>		
Penyusunan Laporan Manajemen Aset	3,600,000	3,600,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	3,593,600	3,579,600	7,495,000	7,500,000	7,498,950	99.82	99.43	99.93	100.00	99.99		
<b>Kerjasama Informasi dan Media Masa</b>	<b>7,500,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>7,485,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>99.80</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
Dukungan Pameran Informasi Pelayanan Publik	7,500,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	7,485,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	99.80	-	100.00	100.00	100.00		
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi</b>	<b>120,000,000</b>	<b>116,000,000</b>	<b>183,500,000</b>	<b>136,531,000</b>	<b>128,322,000</b>	<b>119,836,847</b>	<b>115,651,802</b>	<b>180,708,200</b>	<b>135,914,623</b>	<b>59,916,200</b>	<b>99.86</b>	<b>99.70</b>	<b>98.48</b>	<b>99.55</b>	<b>46.69</b>		
Pengembangan potensi unggulan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi (PMA/PMDN)	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	14,263,000	-	-	-	-	71.32		
Koordinasi perencanaan Pengembangan penanaman modal	30,000,000	25,000,000	45,000,000	24,250,000	29,798,000	29,972,559	24,857,978	44,991,500	24,072,923	20,845,400	99.91	99.43	99.98	99.27	69.96		
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal	20,000,000	26,000,000	30,000,000	38,781,000	27,074,000	20,000,000	26,000,000	29,950,000	38,643,700	24,807,800	100.00	100.00	99.83	99.65	91.63		
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyelenggaraan pameran investasi	70,000,000	65,000,000	108,500,000	73,500,000	51,450,000	69,864,288	64,793,824	105,766,700	73,198,000	-	99.81	99.68	97.48	99.59	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kajian kebijakan penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan cetak biru (master plan) dibidang penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan sistem informasi penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	-	-	47,300,000	34,255,000	40,444,800	-	-	46,549,900	33,663,000	40,294,000	-	-	98.41	98.27	99.63	-	-
Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM	-	-	30,850,000	23,562,500	24,402,800	-	-	30,600,000	23,432,000	24,252,000	-	-	99.19	99.45	99.38	-	-
Fasilitasi pengembangan UMKM	-	-	16,450,000	10,692,500	16,042,000	-	-	15,949,900	10,231,000	16,042,000	-	-	96.96	95.68	100.00	-	-
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	-	-	205,000,000	222,750,000	218,200,000	-	-	203,470,300	219,163,000	213,559,650	-	-	99.25	98.39	97.87	-	-
Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan	-	-	170,000,000	200,000,000	198,800,000	-	-	169,195,300	196,763,000	194,655,250	-	-	99.53	98.38	97.92	-	-
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	-	-	35,000,000	22,750,000	19,400,000	-	-	34,275,000	22,400,000	18,904,400	-	-	97.93	98.46	97.45	-	-
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	-	-	200,000,000	130,000,000	91,000,000	-	-	199,886,542	129,696,847	90,766,400	-	-	99.94	99.77	99.74	-	-
Penyelenggaraan promosi produk UMKM	-	-	200,000,000	130,000,000	91,000,000	-	-	199,886,542	129,696,847	90,766,400	-	-	99.94	99.77	99.74	-	-
Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	-	-	104,150,000	80,663,500	67,191,000	-	-	103,234,100	80,251,640	66,506,300	-	-	99.12	99.49	98.98	-	-



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio anantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi (Pembentukan Koperasi)	-	-	56,000,000	52,000,000	36,250,000	-	-	55,509,100	51,887,640	35,992,800	-	-	99.12	99.78	99.29		
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	-	-	22,650,000	14,722,500	17,000,000	-	-	22,650,000	14,498,000	16,796,000	-	-	100.00	98.48	98.80		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	25,500,000	13,941,000	13,941,000	-	-	25,075,000	13,866,000	13,717,500	-	-	98.33	99.46	98.40		

\*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah  
 \*\*) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota  
 \*\*\*) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Tabel 2.7

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio anantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja	2,217,810,877	2,165,646,681	4,847,790,252	4,191,927,150	5,191,314,220	2,118,354,405	2,062,775,629	4,535,032,948	4,061,322,472	4,922,109,767	95.52	95.25	93.55	96.88	94.81		
Belanja Tak Langsung	1,503,609,877	1,470,525,681	2,489,650,252	2,409,400,500	2,790,408,420	1,418,476,333	1,402,029,505	2,250,977,967	2,294,975,710	2,765,212,634	94.34	95.34	90.41	95.25	99.10		
Belanja Langsung	714,201,000	695,121,000	2,358,140,000	1,782,526,650	2,400,905,800	699,878,072	660,746,124	2,284,054,981	1,766,346,762	2,156,897,133	97.99	95.05	96.86	99.09	89.84		



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SKPD**

Isu-isu strategis merupakan salah satu sumber masukan dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal terhadap proses perencanaan. Jika analisis lingkungan eksternal dan internal diidentifikasi dengan baik dan tepat, maka pemerintahan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan akan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menyesuaikan atau memperhatikan isu strategisnya kemungkinan akan menghadapi hambatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan yang hendak di capai.

Sebagai lembaga teknis, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Mempawah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinir dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah mempunyai permasalahan yang terdapat dalam organisasi yaitu :



1. Masih kurangnya SDM yang menguasai Sistem Pelayanan Informasi secara Elektronik dan staf teknis di bidang pelayanan perizinan serta pelayanan informasi.
2. Kurangnya sarana dan prasarana operasional untuk pengecekan lapangan atau lokasi Pemohon izin dan lokasi investasi.
3. Kondisi Iklim berinvestasi merupakan hal kondisi alam didaerah adalah masalah yang harus dihadapi oleh investor.

### **3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi adalah Aktualisasi dari Citra, Nilai, Arah dan Tujuan yang akan memandu masa depan Daerah, Visi haruslah spesifik dan dinyatakan dengan keyakinan, disamping itu Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana Pemerintahan Daerah harus di bawa agar dapat Eksis, Antisipatif dan Inovatif serta suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan.

Adapun Visi Kepala Daerah 5 (lima) tahun kedepan :



**“MENJADIKAN KABUPATEN MEMPAWAH YANG CERDAS, MANDIRI DAN TERDEPAN”.**

Makna yang terkandung dari Visi sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

**1. SMART**

Smart/Cerdas adalah memiliki arti bahwa jika sumberdaya manusianya cerdas dan tangguh maka akan bisa memutus mata rantai kemiskinan dan kesenjangan sosial dimasyarakat, dan jika SDM nya cerdas maka partisipasi pembangunan akan terwujud.

**2. MANDIRI**

Kemandirian dalam hal ini meliputi dua hal yaitu Pemerintahan Kabupaten dan Masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus menumbuh dan mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara mengoptimalkan segala potensi lokal yang dimiliki. Kemudian masyarakat dilatih dan dididik bagaimana mengelolah sumberdaya yang ada. Sehingga akan terciptanya suatu hubungan simbiosis antara Pemerintah dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah yang berkemandirian.

**3. TERDEPAN**

Terdepan yaitu menjadikan Kabupaten Mempawah terdepan dalam pembangunan kualitas sumberdaya manusia dan terdepan dalam Pembangunan Kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Untuk mencapai Visi Kepala Daerah tersebut di atas dengan melakukan langkah-langkah dengan cara menetapkan Misi-Misi sebagai berikut :



1. *Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien.*
2. *Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.*
3. *Membangun Infrastruktur Publik Yang Memadai dan Efektif Secara Merata.*
4. *Menumbuh dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah.*
5. *Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional Kijing dan Pariwisata.*

Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Mempawah ke dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, berperan melaksanakan Misi ke – 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Mempawah yaitu ***“Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien”***.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi tersebut adalah ***“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”***, dengan sasaran yang di capai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Tersusunnya standar pelayanan (SOP) yang baik agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan dengan baik.

Dari visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama dalam bidang Pelayanan Publik telah sejalan dan terarah dengan Visi, Misi serta program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mempawah.



### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tingkat Lembaga yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Kementerian dilaksanakan pada Kementerian Koperasi dan UMKM.

Adapun Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu : ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”***.

Dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi, BKPM bersama Kementrian terkait akan lebih berperan aktif dalam forum kerjasama Ekonomi International untuk melindungi kepentingan Indonesia.

Visi Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu : ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”***,

Dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum serta Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing.

Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan UMKM sama-sama ingin mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong, namun berbeda pada sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan pada Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tercantum visi ***“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Insfratraktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”***

Bertitik tolak dari visi Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :



1. Mempercepat Pembangunan Insfrastruktur;
2. Mempercepat Pembangunan Insfratruktur Perbatasan;
3. Mempercepat Pemekaran Daerah;
4. Menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance;
5. Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan;
6. Meningkatkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif;
7. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Memperkuat Struktur Ekonomi;
8. Mengurangi Daerah Tertinggal;
9. Mengurangi ketimpangan Antar Penduduk dan Antar Wilayah;
10. 10. Mengurangi Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran;
11. Memperkuat Peran dan Fungsi Penelitian;
12. Memantapkan ketertiban masyarakat;
13. Mewujudkan Masyarakat yang Agamis dan Bermoral;
14. Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Sementara itu Visi Pembangunan Kabupaten Mempawah yang didasarkan pada visi Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi yang tercantum pada Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024 adalah ***“Menjadikan Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan”***

Dari visi Pembangunan Kabupaten Mempawah diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 sebagai berikut

1. *Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien.*
2. *Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.*
3. *Membangun Infrastruktur Publik Yang Memadai dan Efektif Secara Merata.*





4. *Menumbuh dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah.*
5. *Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional Kijing dan Pariwisata.*

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mempawah dituangkan setiap tahunnya dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh setiap SKPD berdasarkan anggaran kinerja.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Mempawah diatas, maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 menetapkan Visi yaitu “ .....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian sasaran pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

1. Kurangnya Personil (Pegawai),
2. Masih kurangnya SDM yang menguasai Sistem Informasi secara Elektronik,
3. Kondisi Iklim Investasi,
4. Tidak adanya Tenaga Pengawas di Bidang Koperasi dan UKM,
5. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Mengenai faktor penghambat dalam rangka Pelayanan Perangkat Daerah yaitu tidak terkoneksi Akses System Informatika secara Eletronik di beberapa Kecamatan sedangkan pada Era sekarang segala pelaporan Berbasis Elektronik.



Upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut di atas Bappeda telah membuat dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mempawah.

Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis; yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Tujuan Utama Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan.

Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program 'lebih hijau' dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berarti juga menerapkan prinsip **precautionary principles**, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi



kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Melalui proses Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah secara umum Tugas dan Fungsinya memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Optimal, Berkesinambungan, Transparan dan Akuntabel kepada Masyarakat juga berupaya meningkatkan minat Investor untuk menanamkan Modal/Investasi baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri, serta meningkatkan pelaku usaha untuk lebih berdaya saing dalam Produk Unggulan yang di kelola oleh Koperasi dan UKM.

Adapun yang menjadi Isu Strategis pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah ke dalam pola Analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsistensi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.



Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

#### **3.4.1. Bidang Perizinan dan Non Perizinan.**

##### **1. Strength (Kekuatan)**

Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah:

- 1.1. Lokasi Kantor yang strategis  
Lokasi Dinas PMKUKMPSTP yang beralamat di Jalan Daeng Manambon, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir adalah Posisi yang strategis. Secara topologi terletak hampir ditengah-tengah wilayah Kabupaten, sehingga diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh penduduk kabupaten.
- 1.2. Gedung Kantor yang Representatif  
Selain didukung dengan lokasi Kantor yang strategis, Sejak tahun 2019 Dinas PMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah menempati kantor yang baru dipugar. Dengan menempati gedung baru, selain membawa prestise bagi Pemerintah Daerah, hal ini akan meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai dan kenyamanan bagi pelaku usaha dan masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan di DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah.
- 1.3. Fasilitas Listrik yang Stabil  
Akses Listrik yang stabil dan dibackup dengan genset, sehingga operasional perangkat kerja yang sehari-hari menggunakan listrik dapat dioperasikan dengan baik.



1.4. Fasilitas Internet yang cukup memadai

Dengan aplikasi online yang digunakan mewajibkan untuk menggunakan Internet sebagai media utamanya. DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah menggunakan layanan Indihome yang diselenggarakan oleh Telkom, untuk mengakses aplikasi secara online diantaranya Online Single Submission, KSWP, Email, Whatsapp dan lain-lain.

**2. Kelemahan (*Weaknes*)**

Berikut adalah kelemahan pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah:

2.1. Rendahnya Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Pegawai tidak sebanding dengan jumlah layanan. Masih Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Perizinan dan Non Perizinan menyebabkan keterlambatan proses perizinan dan non Perizinan. Kalau di tahun 2017 jumlah pegawai Bidang Perizinan ada 12 orang, di tahun 2019 Jumlah PNS di Bidang Perizinan menurun, menjadi hanya ada 7 Orang. Padahal jumlah layanan yang harus diberikan kepada masyarakat semakin bertambah, yang semula 44 jenis layanan, di tahun 2019 menjadi 74 jenis layanan. Hal ini tentu menjadi sebuah ketimpangan dalam hal pelayanan.

PNS di bidang Perizinan dan Non Perizinan tidak saja bertugas mengelola data-data perizinan, menyambut masyarakat dan pelaku usaha dan memberikan pelayanan perizinan dengan senyum yang ramah, di sisi lain, PNS Bidang Perizinan dan Non



Perizinan juga harus mempelajari dan memahami peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perizinan. Ada ratusan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum perizinan, sehingga harus dibagi ke beberapa orang untuk mempelajarinya.

2.2. Ruang Arsip yang Semakin Sempit

Seiring berjalannya waktu, jumlah arsip perizinan juga semakin banyak. Sehingga tempat penyimpanan berkas menjadi semakin sempit. Padahal, arsip-arsip tersebut perlu diamankan, baik dari kerusakan, kehilangan, dimakan rayap, terkena jamur dan lain-lain. Tempat arsip yang semakin sempit, menyebabkan berkas-berkas perizinan tidak tersimpan dengan baik dan benar.

2.3. Arsip Tidak Dikelola Dengan Baik

Lemahnya pengendalian atas berkas-berkas perizinan. Selain berkas-berkas baru yang masuk untuk diproses, ada juga berkas-berkas lama yang harus disimpan dan dijaga. Tidak jarang ada berkas permohonan yang tercecer. Proses tercecernya berkas dikarenakan perpindahan dari DPMKUKMPTSP ke OPD Teknis, atau ada berkas setiap tahun dipinjam oleh instansi lain. Namun pengelola berkas sering kehilangan kendali atas berkas yang dipinjam tersebut.

2.4. Rendahnya Spesifikasi Perangkat Komputer

Di bidang perizinan dan non Perizinan selain mengelola hal-hal administratif seperti surat-menyurat, juga banyak mengelola data-data perizinan dan non perizinan. Data-data tersebut diolah dan dikelola untuk dipersiapkan sebagai bahan laporan. Data



perizinan diolah dan dikelola dengan perangkat Komputer dan aplikasi Basisdata (software). Semakin besar data yang harus dikelola, maka semakin tinggi pula spesifikasi komputer yang akan digunakan.

Perangkat keras (Hardware) Komputer yang tersedia pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan masih menggunakan spesifikasi lama. 7 Unit Komputer semuanya menggunakan Processor Celeron dengan RAM 2 Giga byte. Padahal sekarang data perizinan sudah mencapai ribuan data record. Sehingga untuk melakukan load dan search data memakan waktu yang cukup lama. Padahal kebutuhan komputerisasi, mulai dari input, pemrosesan atau pengolahan Database perizinan, hingga ke pencetakan produk perizinan memerlukan proses komputasi yang handal dan cepat. Sering kali petugas merasa terhambat untuk memproses produk perizinan dengan menggunakan system komputer yang lambat tersebut.

### **3. Kesempatan/Peluang (*Oppurtunity*)**

Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi peluang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha:

#### **3.1. Kerja sama dengan OPD Teknis terkait**

Dalam hal pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMKUKMNPTSP Kabupaten Mempawah juga dibantu oleh OPD teknis. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati tentang SK Tim Teknis



Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Mempawah. Dengan demikian, Selain dilaksanakan oleh tenaga PNS yang ada didalam DPMKUMPTSP itu sendiri, dalam hal verifikasi persyaratan permohonan perizinan dilaksanakan oleh PNS OPD Teknis.

Selain itu, kerjasama juga berupa tenaga Narasumber dalam kegiatan bimtek yang diadakan oleh OPD teknis. Bidang Perizinan dan Non Perizinan mengirimkan Narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh OPD teknis. Hal ini menjadi peluang bagi Bidang perizinan dan Non Perizinan untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat yang lebih spesifik.

### 3.2. Kerja Sama dengan Kecamatan

Dalam hal sosialisasi atau menyampaikan informasi terbaru terkait perizinan ke masyarakat yang lebih luas, Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah melaksanakan kunjungan ke Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah. Dengan harapan, informasi yang disampaikan tersebut, juga disampaikan oleh Kecamatan kepada penduduk kecamatan. Informasi disampaikan lewat majalah dinding kecamatan, proses Rekomendasi Camat maupun tanya jawab secara langsung.

### 3.3. Memanfaatkan Teknologi Informasi

Seiring berkembangnya perangkat keras dan teknologi Informasi, metode penyampaian informasi juga berubah. yang dulunya formulir atau informasi terkait perizinan berbentuk fisik seperti





lembaran, leflet, booklet, standing banner maupun yang lain, kini dapat disampaikan dengan media digital lewat *Whatsapp* maupun Social Media. Bagi pelaku usaha yang bertempat tinggal atau lokasinya jauh, atau dari luar daerah yang ingin mengembangkan usahanya ke Kabupaten Mempawah tentu sangat terbantuan dengan adanya fasilitas tersebut. Tentunya untuk melaksanakan itu semua harus didukung dengan perangkat keras yang cukup. Perangkat keras yang diperlukan diantaranya Tablet, Handphone touchscreen dan Laptop.

#### 4. Tantangan/Ancaman (*Threat*)

Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi ancaman bagi pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah:

- Peraturan Perundang-Undangan yang Sering Berubah
- Mutasi Pegawai
- Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Gagap Teknologi

Sehingga dapat disimpulkan dalam Table berikut ini:

	Positif	Negatif
Internal	<b>Strength (Kekuatan)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lokasi Kantor yang strategis</li><li>2. Gedung Kantor yang Representatif</li><li>3. Fasilitas Listrik yang stabil</li><li>4. Fasilitas Internet yang cukup memadai</li></ol>	<b>Weakness (Kelemahan)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li><li>2. Ruang Arsip yang semakin sempit</li><li>3. Arsip tidak dikelola dengan baik</li><li>4. Rendahnya Spesifikasi Perangkat Komputer yang digunakan</li></ol>



<b>External</b>	<b>Opportunity (Peluang)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalinan Kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis</li><li>2. Adanya Kerjasama dengan Kecamatan</li><li>3. Memanfaatkan Teknologi Informasi</li></ol>	<b>Threats (Ancaman)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah</li><li>2. Mutasi Pegawai</li><li>3. Pelaku Usaha dan Masyarakat yang gagap Teknologi</li></ol>

Dari analisis yang ada diatas, maka dapat dilaksanakan rencana strategis pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan yaitu:

- Melaksanakan digitalisasi arsip Perizinan  
Dengan digitalisasi arsip perizinan pencarian data menjadi lebih cepat. Sehingga bahan-bahan yang diperlukan oleh pimpinan sebagai bahan rapat lebih mudah disiapkan. Ini bisa disiapkan dengan layanan Microsoft Onedrive atau Google Drive.
- Memanfaatkan Teknologi Informasi semaksimal Mungkin.  
Memanfaatkan Aplikasi OSS dari BKPM dan Sicantik dari Kementrian Komunikasi dan Informatika.
- Mengupgrade Komputer yang ada di kantor dengan spesifikasi yang lebih tinggi.
- Menambah tenaga PNS sehingga layanan dapat diberikan secara maksimal kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha
- Melakukan evaluasi secara berjenjang
- Memberikan panduan dan pendampingan bagi pelaku suaha dan Masyarakat yang gagap Teknologi



### 3.4.2. Bidang Penanaman Modal

#### 1. Kekuatan/Potensi (Strenght)

- 1.1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.2. Adanya sarana kerja yang cukup memadai berupa komputer dan jaringan internet dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 1.3. Adanya anggaran DAK nonfisik fasilitasi penanaman modal dari Kementrian Investasi.

#### 2. Kelemahan (Weakness)

- 2.1. Masih terbatasnya anggaran untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan.
- 2.2. Masih terbatasnya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan berupa kendaraan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat.
- 2.3. Kurang personil bidang Penanaman Modal untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- 2.4. Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.
- 2.5. Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal

#### 3. Kesempatan/Peluang (Oportunity) :

- 3.1. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk



pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

- 3.2. Adanya lembaga pemerintah dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3.3. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder yang telah berjalan dengan baik.
- 3.4. Adanya dukungan baik dari pimpinan eksekutif maupun pihak legislatif.

#### **4. Tantangan/Ancaman (Threat)**

- 4.1. Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yang sering mengalami perubahan dalam waktu yang cepat.
- 4.2. Sikap tertutup dan kurang kooperatif dari perusahaan.
- 4.3. Masih rendahnya kemampuan dan kompetensi perusahaan dalam membuat laporan kegiatan perkembangan penanaman modal.

#### **3.4.3. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

##### **3.4.3.1. Program dan Pengawasan Koperasi**

##### **1. Kekuatan/Potesi (Strength)**

- 1.1. Adanya dukungan Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dalam melakukan pendampingan Koperasi
- 1.2. Dari 241 Koperasi yang ada, terdapat 84 Koperasi yang bergerak Usaha Simpan Pinjam
- 1.3. Adanya Buku Saku Digital contoh Format dalam pembuatan Pelaporan RAT dan tata cara pelaksanaan RAT



1.4. Kegiatan pembuatan data base Koperasi dalam bentuk Geospasial

## 2. Kelemahan (*Weaknes*)

2.1. Belum adanya SDM Jabatan Fungsional Khusus Pengawas Koperasi

2.2. Masih kurangnya dukungan operasional berupa alat kerja (Komputer) dan Kendaraan Dinas untuk pembinaan di Lapangan

2.3. Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembinaan perkoperasian

## 3. Kesempatan/Peluang (*Oppurtunity*)

3.1. Adanya dukungan dari UPT Balaikop Provinsi Kalimantan Barat dalam peningkatan SDM Pengurus Koperasi

3.2. Izin Simpan Pinjam melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

3.3. Proses melakukan pembuatan Data Base Koperasi dalam bentuk Geospasial

## 4. Tantangan/Ancaman (*Threat*)

4.1. Masih rendahnya SDM Pengurus Koperasi

4.2. Banyak Pengurus tidak dapat membuat laporan RAT

4.3. Dari 241 Koperasi, terdapat 110 Koperasi tidak aktif

4.4. Masih banyak Koperasi yang tidak melaksanakan RAT

4.5. Masih banyak Koperasi yang tidak diketahui alamatnya

4.6. Kondisi Pandemi Covid 19 yang masih belum berakhir

4.7. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang



Kelembagaan Koperasi. Apabila Koperasi tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut – turut dapat dilakukan pembubaran koperasi sesuai dengan mekanisme yang ada

### **3.4.3.2. Program dan Pengawasan Koperasi**

#### **1. Kekuatan/Potesi (*Strength*)**

- 1.1. Adanya dukungan Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dalam melakukan pendampingan Koperasi
- 1.2. Tersedianya Buku Saku Digital contoh Format dalam pembuatan Pelaporan RAT dan tata cara pelaksanaan RAT

#### **2. Kelemahan (*Weaknes*)**

- 2.1. Masih kurangnya jumlah SDM di Seksi Koperasi
- 2.2. Masih kurangnya dukungan operasional berupa alat kerja (Komputer) dan Kendaraan Dinas untuk pembinaan di Lapangan
- 2.3. Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembinaan perkoperasian

#### **3. Kesempatan/Peluang (*Oppurtunity*)**

- 3.1. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) menyalurkan pinjaman dalam bentuk lunak kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Lainnya
- 3.2. Dukungan Perbankan dalam Pembiayaan Koperasi

#### **4. Tantangan/Ancaman (*Threat*)**



- 4.1. Masih rendahnya SDM Pengurus Koperasi
- 4.2. Dari 241 Koperasi, terdapat 110 Koperasi tidak aktif
- 4.3. Masih banyak Koperasi yang tidak melaksanakan RAT
- 4.4. Masih banyak kopeyai yang tidak diketahui alamatnya
- 4.5. Masih belum tuntasnya penyelesaian Program Layanan Prima Untuk Masyarakat (LAPIM)

**3.4.3.3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM**

**1. Kekuatan/Potesi (*Strength*)**

- 1.1. Dukungan bagi UMKM dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan K-UMKM
- 1.2. Jenis Produk Usaha Mikro yang bervariasi dari berbagai bidang usaha
- 1.3. Potensi untuk mengembangkan produk menjadi produk Unggulan Daerah
- 1.4. Adanya dukungan tenaga Pendamping

**2. Kelemahan (*Weaknes*)**

- 2.1. Jumlah SDM Aparatur (Jabatan Fungsional Seksi UKM) secara Kualitas dan Kuantitas masih sangat-sangat terbatas
- 2.2. Dukungan Operasional terutama perangkat kerja juga sangat-sangat terbatas hanya 1 unit Komputer PC dan 1 unit Printer dalam satu Seksi



- 2.3. Terbatasnya sumber Pendanaan untuk Program Pemberdayaan dan Pengembangan usaha Mikro

### **3. Kesempatan/Peluang (*Opportunity*)**

- 3.1. Peranan Pemangku Kepentingan seperti UPT-PELKOP, Desa/Kelurahan, BP2MI, Iwapi dan lain-lain dalam mengembangkan SDM Pelaku Usaha Mikro melalui pelatihan-pelatihan usaha mikro
- 3.2. Semangat antusias Pelaku Usaha Mikro dalam program pendampingan melalui pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro
- 3.3. Dukungan Akses Permodalan program Kredit Usaha dengan suku bunga rendah melalui Perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti Permodalan Nasional Madani (PNM)
- 3.4. Peranan Pemangku Kepentingan dalam mengembangkan SDM Pelaku Usaha Mikro melalui pelatihan-pelatihan usaha mikro.
- 3.5. Adanya dukungan tenaga Pendamping
- 3.6. Beberapa Pelaku Usaha Mikro antusias dalam program pendampingan melalui pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- 3.7. Akses Permodalan untuk Pelaku Usaha Mikro melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah, Program Kementerian Melalui BPUM dan Wirausaha Pemula





#### **4. Tantangan/Ancaman (*Threat*)**

- 4.1. Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir
- 4.2. Belum ada sarana atau fasilitas tempat pemasaran  
(gedung usaha Mikro)



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

#### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlakukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian tujuan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif.

Adapun untuk menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Kabupaten Mempawah. Salah metode atau analisis yang dianggap valid dan reliable memberikan bantuan untuk memahami kondisi Kabupaten Mempawah adalah metode atau analisis Strengths, Weaknesses, Oppurtunities dan Threatths (SWOT), yang akan mencermati lingkungan ekstern Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah. Dari pencermatan lingkungan intern dan ekstern ini akan diperoleh strategi yang menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan guna memberikan rambu-rambu dalam menetapkan tujuan. Agar dapat mengukur pencapaian pada periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan benefit atau impacts dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya sistem pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai berikut



1. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Aparatur, Keuangan serta meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur.
3. Meningkatkan pertumbuhan Investasi di daerah.
4. Meningkatkan pengembangan UMKM dan Koperasi.

#### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kinerja, dimana akan dapat ditentukan sasaran prioritas dan pendukungnya serta instansi pelaksanaannya.

*Adapun Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :*

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat.
2. Teroptimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi yang berkualitas melalui Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas Sistem pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan melalui partisipasi masyarakat.
4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Keuangan, sarana & Prasarana serta Sumber Daya Aparatur.
5. Meningkatkan minat Investor menanamkan modalnya di daerah.
6. Berkembangnya UMKM dan Koperasi.

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah beserta Indikator Kinerjanya dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut ini :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah**  
**Tahun 2020 – 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE -				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	6	7	8	10	12	14	16'
<b>Misi : Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien</b>									
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Tatakelola Pemerintah yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi</b>		<b>Nilai Sakip</b>						
		<b>1 Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi</b>	<b>1 Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>0 Kec</b>	<b>9 Kec</b>				
<b>Permendagri 13</b>									
<b>Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>87%</b>	<b>90%</b>				
1	Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik			36	36				
2	Jumlah kendaraan yang terpenuhi pemeliharaan dan perizinan			3	7				
3	Jumlah Materai			6.000=200l br 3.000=300l br	6.000=350l br 3.000=300l br				
4	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor			1 Paket	1 Paket				
5	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan			2 Paket	2 Paket				
6	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik dan penerangan			1 Paket	1 Paket				
7	Jumlah jenis surat kabar/koran hariandan jumlah Peraturan Perundang-Undangan			1.000 exp	1.000 exp				
8	Jumlah paket Makanan & Minuman Kantor			2 Paket	2 Paket				
9	Jumlah dokumen laporan, rekomendasi hasil rapat			20 Laporan	30 Laporan				



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi  
Usaha Kecil Dan Menengah dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –  
2024*

			koordinasi dan konsultasi keluar daerah					
		10	Jumlah dokumen laporan, rekomendasi hasil rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	50 Laporan	80 Laporan			
		11	Jumlah petugas keamanan dan ketertiban	2 orang	3 orang			
		12	Jumlah petugas kebersihan kantor, alat kebersihan dan bahan pembersih	2 org, 14 jenis	3org, 14 jenis			
		<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
		1	Jumlah Paket Perlengkapan Gedung Kantor	3 Paket	3 Paket			
		2	Jumlah Kendaraan Roda 4 (empat)	0	1 Unit			
		3	Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat)	0	4 Unit			
		4	Jumlah Paket Meubler	1	4 Paket			
		5	Jumlah Unit Laptop/PC	0	4 Unit			
		6	Pengadaan Paket Alat Studio & Komunikasi yang terpelihara	5 Paket	8 Paket			
		7	Gedung Kantor yang terpelihara	1 Paket	1 Paket			
		8	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	1 Unit	1 Unit			
		9	Persentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	16 Unit	16 Unit			
		10	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Operasional	2 Unit	2 Unit			
		11	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	PC : 9 unit Laptop:2 unit	PC : 9 unit Laptop:2 unit			
		<b>Terpenuhinya Disiplin Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
		1	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30 stell	35 stell			
		<b>Terciptanya Kompetensi Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas &amp; Fungsi</b>		<b>8 Orang</b>	<b>14 Orang</b>			
		1	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan Formal	8 Orang	14 Orang			
		<b>Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
		1	Jumlah Laporan Capaian & Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok	4 dok			
		2	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 dok	1 dok			



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi  
Usaha Kecil Dan Menengah dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –  
2024*

		3	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok					
		4	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	6 dok	5 dok					
		<b>Terciptanya Ketertiban Administrasi Manajemen Aset</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>					
		1	Jumlah Dokumen Laporan pengelolaan Aset/Barang Daerah	7 dok	7 dok					
		<b>Terlaksananya Kegiatan Pameran</b>		<b>1 Kali</b>	<b>1 Kali</b>					
		1	Jumlah Kegiatan Kerjasama Informasi dan Media Masa (Pameran)	1 Kali	1 Kali					
		<b>Persentase Dokumen Arsip Daerah yang terselamatkan</b>		<b>0%</b>	<b>80%</b>					
		1	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	0 Paket	4 Paket					
<b>Permendagri 90</b>										
		<b>Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran</b>					<b>60 Dok</b>	<b>65 Dok</b>	<b>70 Dok</b>	<b>80 Dok</b>
		1	<b>Persentase penyelesaian laporan/dokumen tepat waktu</b>			<b>5 Dok</b>	<b>5 Dok</b>	<b>5 Dok</b>	<b>5 Dok</b>	
		1.1	Jumlah dokumen perencanaan			2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
		1.2	Jumlah dokumen perencanaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		1.3	Jumlah dokumen perencanaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		1.4	Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		1.5	Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		1.6	Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi  
Usaha Kecil Dan Menengah dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –  
2024*

		<b>2</b>	<b>Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		2.1	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100%	100%	100%	100%
		2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		2.3	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		2.4	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
<b>Permendagri 050-5889</b>									
			Persentase jumlah capaian laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang milik Daerah pada SKPD				100%	100%	100%
		3.	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	1 Dok	1 Dok
		3.1	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	1 Dok	1 Dok
		3.2	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Dok	1 Dok	1 Dok
		<b>4</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas SKPD</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		4.1	Jumlah Pakaian dinas ASN			100%	100%	100%	100%
		4.2	jumlah Kegiatan sosialisasi bagi pegawai dinas			100%	100%	100%	100%
		<b>5</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi  
Usaha Kecil Dan Menengah dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –  
2024*

			5.1	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			5.2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			100%	100%	100%	100%
			5.3	Jumlah Bahan Logistik Kantor			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			5.4	Jumlah cetakan dan penggandaan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
			5.5	Jumlah Pameran yang dilaksanakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			5.6	jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi			100%	100%	100%	100%
			6.7	Jumlah Arsip Dinamis SKPD			100%	100%	100%	100%
			<b>5</b>	<b>Persentase Jasa Urusan Pemerintah daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			5.1	12 bulan			100%	100%	100%	100%
			5.2	Orang Bulan			100%	100%	100%	100%
			<b>6</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			6.1	Jumlah roda 2 , roda 4 ,BBM , perpanjangan STNK			100%	100%	100%	100%
			6.2	Jumlah roda 2 , roda 4 ,BBM , perpanjangan STNK			100%	100%	100%	100%
			6.3	Gedung Kantor dan Taman			100%	100%	100%	100%
			6.4	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit PC di Kantor			100%	100%	100%	100%





*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi  
Usaha Kecil Dan Menengah dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –  
2024*

				6.5	Jumlah Pemeliharaan meja , lemari , meubel , kursi , Ac, Komputer			100%	100%	100%	100%		
<b>Misi : Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah</b>													
1.	Meningkatnya Kemandirian Daerah sebagai Basis Perekonomian Daerah	1	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini									
				Meningkatnya investasi dan realisasi penanaman modal daerah guna menunjang ekonomi, sosial dan / manfaat lainnya									
				<b>Permendagri 13</b>									
				<b>Jumlah Koperasi yang berkualitas</b>		<b>246</b>	<b>235</b>						
				1	Jumlah Koperasi yang berbadan Hukum	230	235						
				2	Jumlah Koperasi Yang RAT dan Berkualitas	0 Koperasi	30 Kop						
				3	Prosentasi pengembangan jaringan kerjasama Koperasi	100%	100%						
				4	Jumlah Pengelolaan Koperasi	15	20 Kali						
				5	Jumlah Koperasi yang berbadan hukum	0	9 Kec						
				<b>Tesedianya gambaran serta informasi peluang untuk berinvestasi</b>		<b>75%</b>	<b>80%</b>						
				1	Persentase gambaran Pengembangan potensi unggulan daerah	70%	75%						
				2	Jumlah kegiatan koordinasi antar lembaga untuk mengendalikan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal	8 Kali	8 Kali						
3	Jumlah potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk peluang berinvestasi	50%	55%										



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi  
Usaha Kecil Dan Menengah dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –  
2024*

			4	Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal	70%	70%					
			5	Jumlah kegiatan pameran investasi untuk berinvestasi	2 Kali	2 Kali					
			<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>		<b>0 Kec</b>	<b>9 Kec</b>					
			1	Jumlah/frekuensi kegiatan survey lapangan pelayanan, langsung di lapangan, pertemuan team teknis, rapat-rapat team teknis.	0 Kec	9 Kec					
			<b>Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan</b>		<b>80%</b>	<b>80%</b>					
			1	Jumlah Dokumen Izin Yang diterbitkan	2500 Lembar	2700 Lbr					
			2	Jumlah Pelayanan Perizinan Yang Diselenggarakan	1 Paket	1 Paket					
			3	Informasi Pelayanan Perizinan Yang Dapat Diserap Masyarakat (indikator di perjelas)	1 Paket	1 Paket					
			<b>Meningkatnya efektifitas pengendalian dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</b>		<b>60%</b>	<b>65%</b>					
			1	Persentase Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan	0%	50%					
			2	Jumlah pengendalian pelayanan perizinan	20%	9 Kec					
			3	Presentasesurvey Kepuasan Masyarakat	20%	50%					
			4	Jumlah kegiatan sosialisasi untuk peningkatan peran serta masyarakat	20%	2 Kali					
			5	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	0%	2 Kasus					
			6	Jumlah dokumen standar pelayanan publik	0%	1 Dok					
<b>Permendagri 90</b>											
			<b>Capaian Koperasi Yang Dilakukan Pengawasan</b>					<b>20 Koperasi</b>	<b>30 Koperasi</b>	<b>40 Koperasi</b>	<b>50 Koperasi</b>



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi  
Usaha Kecil Dan Menengah dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –  
2024*

			<b>1</b>	<b>Laopran Tahunan Koperasi</b>			<b>20 Kopera si</b>	<b>30 Kopera si</b>	<b>40 Kopera si</b>	<b>50 Kopera si</b>	
			1.1	Persentase Kualitas Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro (LKM)			20 Kopera si	30 Kopera si	40 Kopera si	50 Kopera si	
			1.2	Persentase Kepatuhan Koperasi sesuai dengan Peraturan yang ada			20 Kopera si	30 Kopera si	40 Kopera si	50 Kopera si	
			<b>Persentase Koperasi yang Dibina</b>					<b>20 Kopera si</b>	<b>30 Kopera si</b>	<b>40 Kopera si</b>	<b>50 Kopera si</b>
			<b>1</b>	<b>Bertambahnya Peningkatan Kualitas dan Kesenambungan Jalannya Usaha Koperasi</b>			<b>20 Kopera si</b>	<b>30 Kopera si</b>	<b>40 Kopera si</b>	<b>50 Kopera si</b>	
			1.1	Bertambahnya Usaha Koperasi			20 Kopera si	30 Kopera si	40 Kopera si	50 Kopera si	
			<b>Penyelenggaraan pameran investasi</b>					<b>50 Perusa haan</b>	<b>55 Perusa haan</b>	<b>70 Perusa haan</b>	<b>74 Perusa haan</b>
			<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan pameran investasi</b>			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
			1.1	Penyelenggaraan Pameran			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
			<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal</b>					<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi  
Usaha Kecil Dan Menengah dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –  
2024*

				<b>1</b>	<b>Penyebarluasan informasi pelayanan terpadu</b>				<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	
				1.1	Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem				70%	80%	90%	100%	
				1.2	Dokumen laporan				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				1.3	Dokumen laporan				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				<b>Persentase pengelolaan data informasi penanaman modal</b>						<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>
				<b>1</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota</b>				<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	
				1.1	Persentase Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
<b>Misi : Memperkuat Basis Perekonomian Daerah melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata</b>													
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Daerah melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah</b>												
		<b>1</b>	<b>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>Rasio PAD Terhadap APBD</b>								



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi  
Usaha Kecil Dan Menengah dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –  
2024*

			<b>Permendagri 13</b>						
			<b>Terciptanya Iklim Investasi yang kompetitif</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>				
			1 Presentase kajian sumberdaya dan potensi untuk berinvestasi	25%	25%				
			2 Jumlah potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk peluang berinvestasi	60%	60%				
			3 Presentase gambaran potensi daerah perencanaan investasi	75%	75%				
			4 Persentase informasi dan data perkembangan penanaman modal	75%	75%				
			<b>Permendagri 90</b>						
			<b>Data potensi investasi</b>			<b>50</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>
			1 <b>Data potensi investasi</b>			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			1.1 Data potensi investasi			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			<b>Persentase Investasi Asing dan Lokal yang Dibina</b>			<b>55 Perusa haan</b>	<b>60 Perusa haan</b>	<b>70 Perusa haan</b>	<b>74 Perusa haan</b>
			1 <b>Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</b>			<b>2 Perusa haan</b>	<b>2 Perusa haan</b>	<b>2 Perusa haan</b>	<b>2 Perusa haan</b>
			1.1 Data Realisasi Penanaman Modal (Dokumen)			2 Perusa haan	2 Perusa haan	2 Perusa haan	2 Perusa haan
		2	<b>Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah</b>	<b>PDRB PERKAPITA</b>					
			<b>Permendagri 13</b>						
			<b>Jumlah Sarana &amp; Lahan (Pasar) Bagi Pengusaha Kecil Menengah</b>	<b>2 Kali</b>	<b>3 Kali</b>				
			1 Jumlah sarana produk UMKM yang dibantu	0 UMKM	100 UMKM				
			2 Jumlah promosi Pemasaran Produk UMKM	2 Kali	3 Kali				



*Rencana Strategis (RENSTRA)*  
*Dinas Penanaman Modal, Koperasi*  
*Usaha Kecil Dan Menengah dan*  
*Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –*  
**2024**

			<b>Permendagri 90</b>							
			<b>Persentase UMKM yang Berkembang</b>			<b>65 UKM</b>	<b>70 UKM</b>	<b>85 UKM</b>	<b>85 UKM</b>	
		<b>1</b>	<b>Bertambahnya Usaha Mikro</b>			<b>70 UKM</b>	<b>80 UKM</b>	<b>90 UKM</b>	<b>100 UKM</b>	
		1.1	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil			70 UKM	80 UKM	90 UKM	100 UKM	
	<b>3</b>	<b>Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja</b>	<b>Tingkat Pengangguran</b>							
			<b>Permendagri 13</b>							
			<b>Jumlah UMKM Yang Aktif</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>					
		1	Prosentasi Koordinasi & Pengembangan UKM	100%	100%					
		2	Prosentasi pembinaan UKM	96%	100%					
		3	Jumlah Fasilitasi Permasalahan UMKM yang di tangani	0 Kali	5 Kali					
		4	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM	0 Kali	20 Kali					
		5	Tersedianya database Usaha Mikro dan Kecil yang valid bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan	0%	UMKM					
			<b>Jumlah Sarana &amp; Lahan (Pasar) Bagi Pengusaha Kecil Menengah</b>	<b>2 Kali</b>	<b>3 Kali</b>					
		1	Jumlah sarana produk UMKM yang dibantu	0 UMKM	100 UMKM					
		2	Jumlah promosi Pemasaran Produk UMKM	2 Kali	3 Kali					
			<b>Permendagri 90</b>							
			<b>Persentase UKM yang Dibina</b>			<b>70 UKM</b>	<b>80 UKM</b>	<b>90 UKM</b>	<b>100 UKM</b>	
		1	Persentase Pembinaan Pendataan dan Pengembangan Usaha Mikro			<b>70 UKM</b>	<b>80 UKM</b>	<b>90 UKM</b>	<b>100 UKM</b>	



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi  
Usaha Kecil Dan Menengah dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 –  
2024*

						70 UKM	80 UKM	90 UKM	100 UKM
						70 UKM	80 UKM	90 UKM	100 UKM
						70 UKM	80 UKM	90 UKM	100 UKM
						70 UKM	80 UKM	90 UKM	100 UKM



## **BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi.

Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan. Kebijaksanaan merupakan komitmen yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat (eksekutif dan legislatif) untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan.

Kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Selain itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu kebijakan sebagai konsepsi operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, harus tetap dikomitmenkan bersama,

*RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024*





sehingga arah pelaksanaan program dan kegiatan dapat diberikan keterkaitannya dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana tabel 5.1. berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<i>VISI : Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan</i>			
<i>MISI I : Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien</i>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat.</li> <li>2. Teroptimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi yang berkualitas melalui Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas Sistem pengendalian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi jadwal kegiatan sosialisasi di 9 Kecamatan.</li> <li>2. Optimalisasi koordinasi team kerja teknis.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi perizinan dan non perizinan melalui website.</li> <li>4. Optimalisasi Penunjang pelayanan Perizinan &amp; Non Perizinan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Sosialisasi di 9 Kecamatan.</li> <li>2. Membangun Komunikasi Seluruh Instansi Teknis Terkait Pelimpahan Kewenangan Perizinan &amp; Non Perizinan.</li> <li>3. Melaksanakan Kesenambungan Website Melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hosting</li> <li>- Update</li> <li>- Maintenance</li> </ul> </li> <li>4. Menyediakan</li> </ol>



	<p>pelayanan perizinan dan non perizinan melalui partisipasi masyarakat.</p>	<p>5. Optimalisasi Simple Zitu. 6. Penyederhanaan perizinan. 7. Mengoptimalkan Sistem Informasi pengendalian dan pengaduan masyarakat. 8. Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan sarana pendukung pelayanan publik.</p>	<p>Sarana Penunjang Administrasi Pelayanan Perizinan &amp; Non Perizinan. 5. Melaksanakan Kesiambungan Simple Zitu Melalui Update Sistem &amp; Maintenance. 6. Penataan prosedur perizinan yang efisien dan efektif. 7. Optimalisasi Sistem Informasi pengendalian dan pengaduan masyarakat di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan. 8. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.</p>
<p>Meningkatkan Kualitas Pelayanan</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan</p>	<p>1. Tersusunnya Kebijakan Teknis</p>	<p>1. Tersedianya Anggaran Dalam</p>



<p>Administrasi, Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Aparatur, Keuangan serta meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur</p>	<p>Administrasi dan Keuangan, sarana &amp; Prasarana serta Sumber Daya Aparatur</p>	<p>Operasional &amp; Rencana Kegiatan Dinas. 2. Mengusulkan Anggaran Belanja Modal Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPA) Mengenai Pengadaan Sarana &amp; Prasarana. 3. Mengusulkan Para PNS/ASN untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Jakarta) &amp; Instansi Penyelenggaran Diklat dan Bimtek dalam</p>	<p>Mendukung Program &amp; Kegiatan Yang Tercantum Dalam DPA &amp; Anggaran Kas. 2. Bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam dukungan dana pengadaan sarana dan prasarana. 3. Bekerjasama Dengan Badan Kepegawaian &amp; Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Mempawah dalam Hal Dukungan Dana Diklat Untuk Para PNS / ASN di DPMKUKMPTSP Kab. Mempawah. 4. Menyusun laporan keuangan secara akrual berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. 5. Telah disusunnya inventaris barang</p>
--	---	--	---



		<p>Rangka Peningkatan Kapasitas Pengentahuan dan Kemampuan Sumbernya Aparatur.</p> <p>4. Mengolah data keuangan secara akurat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pertanggung jawaban lapoaran keuangan.</p> <p>5. Menginventarisir data-data aset sesuai jenisnya berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan.</p> <p>6. Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat mengenai program</p>	<p>persemester sampai berakhirnya Tahun Anggaran (setiap tahunnya).</p> <p>6. Mengoptimalkan sinergi antara Pemerintah &amp; para investor dalam berinvestasi di daerah.</p> <p>7. Telah disusunnya dokumen arsip daerah sesuai dengan jenisnya.</p>
--	--	--	--



		<p>kerja/kegiatan yang telah dilaksanakan.</p> <p>7. Tercatatnya dokumen arsip daerah sesuai dengan jenisnya.</p>	
<p><i>MISI V : Menumbuh dan Mengembangkan Perekonomian Desa Guna Menciptakan Kemandirian Masyarakat Desa</i></p>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah	Meningkatkan minat Investor menanamkan modalnya di daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti kegiatan promosi dan pameran.</li> <li>2. Mengembangkan potensi investasi yang ada.</li> </ol>	Mempercepat dan mempercepat proses perizinan
Meningkatkan pengembangan UMKM dan Koperasi	Berkembangnya UMKM dan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan kepada UKM yang berkesinambungan.</li> <li>2. Pembinaan kepada koperasi berkesinambungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas UMKM.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelaku usaha koperasi.</li> </ol>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun program dan kegiatan serta pendanaan urusan yang di tangani Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dijabarkan pada Tabel **6.1.** berikut ini :



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpebihnya Disiplin Aparatur	100%	100%	30 Juta													
			01.03.02	1 Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30 stel	35 stel	30 Juta													
			01.05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terciptanya Kompetensi Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi	8 Orang	14 Orang	115 juta													
			01.05.01	1 Sosialisasi	1 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan Formal	8 Orang	14 Orang	115 juta													
			01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpebihnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	83 Juta													
			01.06.01	1 Penyusunan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Jumlah Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok	4 dok	20 Juta													
			01.06.02	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 dok	1 dok	8 Juta													
			01.06.04	3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	20 Juta													
			01.06.05	4 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	4 Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	6 dok	5 dok	35 Juta													
			01.15	Peningkatan & Pengembangan	Terciptanya Keterbacaan Administrasi	100%	100%	12 Juta													
			01.15.16	1 Penyusunan Laporan Manajemen Aset	1 Jumlah Dokumen Laporan pengelolaan	7 dok	7 dok	12 Juta													
			01.18	Kerjasama Informasi dan Media Masa	Terlaksananya Kegiatan Pameran	1 Kali	1 Kali	30 Juta													
			01.18.04	1 Dukungan Pameran Informas	1 Jumlah Kegiatan Kerjasama Informasi dan	1 Kali	1 Kali	30 juta													
				Penyelamatan dan Pelestarian	Persentase Dokumen Arsip Daerah yang	0%	80%	50 juta													
				1 Pendaftaran dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	1 Pendaftaran dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	0 Paket	4 Paket	50 juta													
				<b>Permendagri 90</b>																	
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>60 Dok</b>	<b>3,710,826,547</b>	<b>65 Dok</b>	<b>4,267,450,531</b>	<b>70 Dok</b>	<b>4,969,555,412</b>	<b>80 Dok</b>	<b>5,643,703,327</b>	<b>80 Dok</b>	<b>5,643,703,327</b>				
				<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1. Persentase penyelesaian laporan/dokumen tepat waktu</b>			<b>5 Dok</b>	<b>-</b>	<b>5 Dok</b>	<b>-</b>	<b>5 Dok</b>	<b>-</b>	<b>5 Dok</b>	<b>-</b>	<b>5 Dok</b>	<b>-</b>	<b>5 Dok</b>	<b>-</b>	<b>5 Dok</b>	<b>-</b>
				1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dokumen perencanaan			2 Dok	5,215,642	2 Dok	5,997,989	2 Dok	6,897,687	2 Dok	7,932,340	2 Dok	7,932,340				
				1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2 Jumlah dokumen perencanaan			1 Dok	3,100,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	4,000,000	1 Dok	4,500,000	1 Dok	4,500,000				
				1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.3 Jumlah dokumen perencanaan			1 Dok	3,100,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	4,000,000	1 Dok	4,500,000	1 Dok	4,500,000				
				1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.4 Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	2,150,000	1 Dok	2,500,000	1 Dok	3,000,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	3,500,000				
				1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.5 Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	2,081,284	1 Dok	2,495,977	1 Dok	2,795,374	1 Dok	3,364,680	1 Dok	3,364,680				
				1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.6 Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	15,646,927	1 Dok	17,993,966	1 Dok	20,693,061	1 Dok	23,797,020	1 Dok	23,797,020				
				<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2. Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
				2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.1 Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100%	2,987,428,991	100%	3,435,543,340	100%	3,950,874,841	100%	4,543,506,067	100%	4,543,506,067				



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTP/PT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat				
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dok	7,823,463	1 Dok	8,996,983	1 Dok	10,346,530	1 Dok	11,898,510	1 Dok	11,898,510		
				2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.3	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 Dok	15,646,927	1 Dok	17,993,966	1 Dok	20,693,061	1 Dok	23,797,020	1 Dok	23,797,020		
				2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.4	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			1 Dok	5,215,642	1 Dok	5,997,989	1 Dok	6,897,687	1 Dok	7,932,340	1 Dok	7,932,340		
				<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas SKPD</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>		
				3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	3.1	Jumlah Pakaian dinas ASN			100%	21,264,382	100%	24,454,039	100%	28,122,145	100%	32,340,467	100%	32,340,467		
				3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.2	jumlah Kegiatan sosialisasi bagi pegawai dinas			100%	5,215,642	100%	5,997,989	100%	6,897,687	100%	7,932,340	100%	7,932,340		
				<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>		
				4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.1	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			1 Paket	5,207,923	1 Paket	5,989,112	1 Paket	6,887,478	1 Paket	7,920,600	1 Paket	7,920,600		
				4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			100%	16,109,513	100%	20,375,939	100%	21,432,330	100%	23,397,180	100%	23,397,180		
				4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.3	Jumlah Bahan Logistik Kantor			1 Paket	19,819,441	1 Paket	22,792,357	1 Paket	26,211,210	1 Paket	30,142,892	1 Paket	30,142,892		
				4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4.4	Jumlah cetakan dan pengandaan			2 Paket	115,919,396	2 Paket	133,307,305	2 Paket	153,303,401	2 Paket	176,298,911	2 Paket	176,298,911		
				4.5	Penyediaan Bahan/Material	4.5	Jumlah Pameran yang dilaksanakan			1 Paket	57,372,065	1 Paket	65,977,874	1 Paket	75,874,556	1 Paket	87,255,739	1 Paket	87,255,739		
				4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.6	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi			100%	73,018,991	100%	83,971,840	100%	96,567,616	100%	111,052,759	100%	111,052,759		
				4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.7	Jumlah Arsip Dinamis SKPD			100%	19,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000		
				<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.</b>	<b>Persentase Jasa Urusan Pemerintah daerah</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>		
				5.1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1	12 bulan			100%	208,625,690	100%	239,919,543	100%	275,907,475	100%	317,293,596	100%	317,293,596		
				5.2	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	5.2	Orang Bulan			100%	52,637,722	100%	60,533,380	100%	69,613,387	100%	80,055,395	100%	80,055,395		
				<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>		
				6.1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.1	Jumlah roda 2 , roda 4 , BBM , perpanjangan STNK			100%	23,846,959	100%	27,424,003	100%	31,537,604	100%	36,268,244	100%	36,268,244		
				6.2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.2	Jumlah roda 2 , roda 4 , BBM , perpanjangan STNK			100%	17,222,051	100%	19,805,358	100%	22,776,162	100%	26,192,586	100%	26,192,586		
				6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.3	Gedung Kantor dan Taman			100%	12,517,541	100%	14,395,173	100%	16,554,448	100%	19,037,616	100%	19,037,616		
				6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.4	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit PC di Kantor			100%	5,215,642	100%	5,997,989	100%	6,897,687	100%	7,932,340	100%	7,932,340		



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat			
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			01.19.03	3 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	3 Informasi Pelayanan Perizinan Yang Dapat Diserap Masyarakat (indikator di perelas)	1 Paket	1 Paket	20 Juta														
			01.17	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya efektifitas pengendalian dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	60%	65%	295 juta													Bidang Peritinan dan Non Peritinan	Kabupaten Mempawah
			24.02	1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1 Persentase Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan	0%	50%	50 juta														
			24.03	2 Pengendalian pelayanan terpadu	2 Jumlah pengendalian pelayanan perizinan	20%	9 Kec	65 juta														
			24.04	3 Survey Kepuasan Masyarakat	3 Presentasesurvey Kepuasan Masyarakat	20%	50%	50 juta														
			24.05	4 Sosialisasi pelayanan Terpadu	4 Jumlah kegiatan sosialisasi untuk peningkatan peran serta masyarakat	20%	2 Kali	75 juta														
			24.06	5 Penanganan pengaduan masyarakat	5 Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	0%	2 Kasus	20 juta														
			24.07	6 Penyusunan standar pelayanan publik	6 Jumlah dokumen standar pelayanan publik	0%	1 Dok	35 juta														
				<b>Permendagri 90</b>																		
				<b>PROGRAM PENGAWASAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Capaian Koperasi Yang Dilakukan Pengawasan</b>				20 Koperasi	29,932,575	30 Koperasi	35,919,090	40 Koperasi	43,102,908	50 Koperasi	51,723,490	50 Koperasi	51,723,490		Bidang Koperasi dan UUM	Kabupaten Mempawah	
				1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Laopran Tahunan Koperasi			20 Koperasi	-	30 Koperasi	-	40 Koperasi	-	50 Koperasi	-	50 Koperasi	-					
				1.1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.1 Persentase Kualitas Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro (LKM)			20 Koperasi	15,000,000	30 Koperasi	18,000,000	40 Koperasi	21,600,000	50 Koperasi	25,920,000	50 Koperasi	25,920,000					
				1.2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	1.2 Persentase Kepatuhan Koperasi sesuai dengan Peraturan yang ada			20 Koperasi	14,932,575	30 Koperasi	17,919,090	40 Koperasi	21,502,908	50 Koperasi	25,803,490	50 Koperasi	25,803,490					
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Dibina</b>			20 Koperasi	25,000,000	30 Koperasi	30,000,000	40 Koperasi	36,000,000	50 Koperasi	43,200,000	50 Koperasi	43,200,000		Bidang Koperasi dan UUM	Kabupaten Mempawah		
				1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Bertambahnya Peningkatan Kualitas dan Kesenambungan Jalannya Usaha Koperasi			20 Koperasi	-	30 Koperasi	-	40 Koperasi	-	50 Koperasi	-	50 Koperasi	-					
				1.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Reruktisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	1.1 Bertambahnya Usaha Koperasi			20 Koperasi	25,000,000	30 Koperasi	30,000,000	40 Koperasi	36,000,000	50 Koperasi	43,200,000	50 Koperasi	43,200,000					
				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Penyelenggaraan pameran investasi</b>			50 Perusa	49,979,200	55 Perusa	62,474,000	70 Perusa	78,092,500	74 Perusa	97,615,625	74 Perusa	97,615,625		Bidang Penanaman Modal	Kabupaten Mempawah		
				1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelenggaraan pameran investasi			1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-					





**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat					
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			01.15...	5	Penyusunan database Usaha Mikro dan Kecil	5 Tersedianya database Usaha Mikro dan Kecil yang valid bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan	0%	UMKM	120 juta															
			01.17		Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Jumlah Sarana & Lahan (Pasar) Bagi Pengusaha Kecil Menengah	2 Kali	3 Kali	500 juta												Bidang Koperasi dan UKM	Kabupaten Mempawah		
			01.17...	1	Pengembangan sarana prasarana produk UMKM	1 Jumlah sarana produk UMKM yang dibantu produk UMKM	0 UMKM	100 UMKM	300 juta															
			01.17.09	2	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	2 Jumlah promosi Pemasaran Produk UMKM	2 Kali	3 Kali	200 juta															
					<b>Permendagri 90</b>																			
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>																			
				1.	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>																			
				1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.1 Database Para Pelaku Usaha Mikro		70	UMKM	85,034,800	80	UMKM	127,552,200	90	UMKM	159,440,250	100	UMKM	199,300,313	100	UMKM	199,300,313	Bidang Koperasi dan UKM	Kabupaten Mempawah
				1.2	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1.2 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan UMKM		70	UMKM	-	80	UMKM	-	90	UMKM	-	100	UMKM	-	100	UMKM	-		
				1.3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	1.3 Jumlah Pelatihan Kepada pelaku wirasaha/UMKM		70	UMKM	16,034,800	80	UMKM	29,552,200	90	UMKM	46,440,250	100	UMKM	69,300,313	100	UMKM	69,300,313		
				1.4	Koordinas dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam pemberdayaan Usaha Mikro	1.4 Jumlah Koordinasi Pengembangan UMKM		70	UMKM	15,000,000	80	UMKM	23,000,000	90	UMKM	28,000,000	100	UMKM	35,000,000	100	UMKM	35,000,000		
									30,000,000	80	UMKM	40,000,000	90	UMKM	45,000,000	100	UMKM	50,000,000	100	UMKM	50,000,000			
									24,000,000	80	UMKM	35,000,000	90	UMKM	40,000,000	100	UMKM	45,000,000	100	UMKM	45,000,000			



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhiya Disiplin Aparatur	100%	100%	30 juta													
			01.03.02	1 Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30 stell	35 stell	30 juta													
			01.05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terciptanya Kompetensi Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi	8 Orang	14 Orang	115 juta													
			01.05.01	1 Sosialisasi	1 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan Formal	8 Orang	14 Orang	115 juta													
			01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhiya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	83 juta													
			01.06.01	1 Penyusunan Laporan Capaian & Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1 Jumlah Laporan Capaian & Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok	4 dok	20 juta													
			01.06.02	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 dok	1 dok	8 juta													
			01.06.04	3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	20 juta													
			01.06.05	4 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	4 Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	6 dok	5 dok	35 juta													
			01.15	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan	Terciptanya Ketertiban Administrasi	100%	100%	12 juta													
			01.15.16	1 Penyusunan Laporan Manajemen Aset	1 Jumlah Dokumen Laporan pengelolaan	7 dok	7 dok	12 juta													
			01.18	Kerjasama Informasi dan Media Masa	Terlaksananya Kegiatan Pameran	1 Kali	1 Kali	30 juta													
			01.18.04	1 Dukungan Pameran Informasi Pelayanan	1 Jumlah Kegiatan Kerjasama Informasi dan	1 Kali	1 Kali	30 juta													
				Penyelamatan dan Pelestarian	Persentase Dokumen Arsip Daerah yang	0%	80%	50 juta													
				1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	0 Paket	4 Paket	50 juta													
				Permendagri 90																	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran			60 Dok	3,710,826,547	65 Dok	4,183,478,691	70 Dok	4,969,555,412	80 Dok	5,643,703,327	80 Dok	5,643,703,327				
				1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase penyelesaian laporan/dokumen tepat waktu			5 Dok	-	5 Dok	-	5 Dok	-	5 Dok	-	5 Dok	-				
				1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dok	5,215,642	2 Dok	5,997,989	2 Dok	6,897,687	2 Dok	7,932,340	2 Dok	7,932,340				
				1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2 Jumlah dokumen perencanaan			1 Dok	3,100,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	4,000,000	1 Dok	4,500,000	1 Dok	4,500,000				
				1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.3 Jumlah dokumen perencanaan			1 Dok	3,100,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	4,000,000	1 Dok	4,500,000	1 Dok	4,500,000				
				1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.4 Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	2,150,000	1 Dok	2,500,000	1 Dok	3,000,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	3,500,000				
				1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.5 Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	2,081,284	1 Dok	2,495,977	1 Dok	2,795,374	1 Dok	3,364,680	1 Dok	3,364,680				
				1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.6 Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	15,646,927	1 Dok	17,993,966	1 Dok	20,693,061	1 Dok	23,797,020	1 Dok	23,797,020				
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran			100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-				
				2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.1 Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100%	2,987,428,991	100%	3,435,543,340	100%	3,950,874,841	100%	4,543,506,067	100%	4,543,506,067				



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dok	7,823,463	1 Dok	8,996,983	1 Dok	10,346,530	1 Dok	11,898,510	1 Dok	11,898,510		
				2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.3	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 Dok	15,646,927	1 Dok	17,993,966	1 Dok	20,693,061	1 Dok	23,797,020	1 Dok	23,797,020		
				2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.4	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester			1 Dok	5,215,642	1 Dok	5,997,989	1 Dok	6,897,687	1 Dok	7,932,340	1 Dok	7,932,340		
				Permendagri 050_5889																	
				3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah																	
				3.1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.1	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD			100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
				3.2	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	3.2	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100%		100%		100%	4,200,000	100%	5,200,000	100%	5,200,000		
				4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah																	
				4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							1 Unit	464,509,100	1 Unit	464,509,100	1 Unit	464,509,100		
				4.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							7 Unit	678,424,000	7 Unit	678,424,000	7 Unit	678,424,000		
				4.3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.3	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan							2 Buah	2,000,000	2 Buah	2,000,000	1 Unit	2,000,000		
				4.4	Pengadaan Mebel	4.4	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan														
				4.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.5	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan														
				4.6	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	4.6	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan														
				4.7	Pengadaan Aset Tak Berwujud	4.7	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan														
				4.8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.8	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
				4.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.9	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
				4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
				3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.1	Jumlah Pakaian dinas ASN			100%	21,264,382	100%	24,454,039	100%	28,122,145	100%	32,340,467	100%	32,340,467		
				3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.2	Jumlah Kegiatan sosialisasi bagi pegawai dinas			100%	5,215,642	100%	5,997,989	100%	6,897,687	100%	7,932,340	100%	7,932,340		
				5. Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
				4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.1	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			1 Paket	5,207,923	1 Paket	5,989,112	1 Paket	6,874,780	1 Paket	7,920,600	1 Paket	7,920,600		
				4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			100%	16,109,513	100%	20,375,939	100%	21,432,330	100%	23,397,180	100%	23,397,180		
				4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.3	Jumlah Bahan Logistik Kantor			1 Paket	19,819,441	1 Paket	22,792,357	1 Paket	26,211,210	1 Paket	30,142,892	1 Paket	30,142,892		

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat				
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.4	Jumlah cetakan dan penggandaan			2 Paket	115,919,396	2 Paket	133,307,305	2 Paket	153,303,401	2 Paket	176,298,911	2 Paket	176,298,911		
				4.5	Penyediaan Bahan/Material	4.5	Jumlah Pameran yang dilaksanakan			1 Paket	57,372,065	1 Paket	65,977,874	1 Paket	75,874,556	1 Paket	87,255,739	1 Paket	87,255,739		
				4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.6	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi			100%	73,018,991	100%	73,018,991	100%	96,567,616	100%	111,052,759	100%	111,052,759		
				4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.7	Jumlah Arsip Dinamis SKPD			100%	19,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000		
				<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.</b>	<b>Persentase Jasa Urusan Pemerintah daerah</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>		
				5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1	12 bulan			100%	208,625,690	100%	239,919,543	100%	275,907,475	100%	317,293,596	100%	317,293,596		
				5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.2	Orang Bulan			100%	52,637,722	100%	60,533,380	100%	69,613,387	100%	80,055,395	100%	80,055,395		
				<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>		
				6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.1	Jumlah roda 2 ,roda 4 ,BBM , perpanjangan STNK			100%	23,846,959	100%	27,424,003	100%	31,537,604	100%	36,268,244	100%	36,268,244		
				6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.2	Jumlah roda 2 , roda 4 , BBM , perpanjangan STNK			100%	17,222,051	100%	19,805,358	100%	22,776,162	100%	26,192,586	100%	26,192,586		



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			01.19	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	80%	80%	235 Juta												Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Mempawah
			01.19.04	1 Dukungan Pelayanan Terpadu	1 Jumlah Dokumen Izin Yang diterbitkan	2500 Lembar	2700 Lhr	180 Juta													
			01.19.01	2 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	2 Jumlah Pelayanan Perizinan Yang Diselenggarakan	1 Paket	1 Paket	35 Juta													
			01.19.03	3 Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	3 Informasi Pelayanan Perizinan Yang Dapat Diserap Masyarakat (Indikator di perjelas)	1 Paket	1 Paket	20 Juta													
			01.17	Mengintegrasikan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya efektifitas pengendalian dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	60%	65%	295 Juta												Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Mempawah
			24.02	1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1 Persentase Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan	0%	50%	50 Juta													
			24.03	2 Pengendalian pelayanan terpadu	2 Jumlah pengendalian pelayanan perizinan	20%	9 Kec	65 Juta													
			24.04	3 Survey Kepuasan Masyarakat	3 Presentasesurvey Kepuasan Masyarakat	20%	50%	50 Juta													
			24.05	4 Sosialisasi pelayanan Terpadu	4 Jumlah kegiatan sosialisasi untuk peningkatan peran serta masyarakat	20%	2 Kali	75 Juta													
			24.06	5 Penanganan pengaduan masyarakat	5 Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	0%	2 Kasus	20 Juta													
			24.07	6 Penyusunan standar pelayanan publik	6 Jumlah dokumen standar pelayanan publik	0%	1 Dok	35 Juta													
				<b>Permendagri 90</b>																	
				<b>PROGRAM PENGAWASAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Capaian Koperasi Yang Dilakukan Pengawasan</b>				20 Koperasi	29,932,575	30 Koperasi	35,919,090	40 Koperasi	43,102,908	50 Koperasi	51,723,490	50 Koperasi	51,723,490	Bidang Koperasi dan UKM	Kabupaten Mempawah	
				1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Laopran Tahunan Koperasi				20 Koperasi	-	30 Koperasi	-	40 Koperasi	50 Koperasi	-	50 Koperasi	-				
				1.1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.1 Persentase Kualitas Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro (LKM)				20 Koperasi	15,000,000	30 Koperasi	18,000,000	40 Koperasi	21,600,000	50 Koperasi	25,920,000	50 Koperasi	25,920,000			
				1.2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	1.2 Persentase Kepatuhan Koperasi sesuai dengan Peraturan yang ada				20 Koperasi	14,932,575	30 Koperasi	17,919,090	40 Koperasi	21,502,908	50 Koperasi	25,803,490	50 Koperasi	25,803,490			
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Dibina</b>				20 Koperasi	25,000,000	30 Koperasi	30,000,000	40 Koperasi	36,000,000	50 Koperasi	43,200,000	50 Koperasi	43,200,000	Bidang Koperasi dan UKM	Kabupaten Mempawah	
				1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Bertambahnya Peningkatan Kualitas dan Kesenambungan Jalannya Usaha Koperasi				20 Koperasi	-	30 Koperasi	-	40 Koperasi	50 Koperasi	-	50 Koperasi	-				
				1.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Rentruksisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	1.1 Bertambahnya Usaha Koperasi				20 Koperasi	25,000,000	30 Koperasi	30,000,000	40 Koperasi	36,000,000	50 Koperasi	43,200,000	50 Koperasi	43,200,000			

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat			
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Permendagri 050, 5889																		
				<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>											25,487,150		30,584,580		30,584,580	Bidang Koperasi		
				1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi																		
				1.1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	1.1 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan										25,487,150		30,584,580		30,584,580			
				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Penyelenggaraan pameran investasi			50 Perusa	49,979,200	55 Perusa	62,474,000	70 Perusaha	78,092,500	74 Perusaha	97,615,625	74 Perusaha	97,615,625		97,615,625	Bidang Penanaman Modal	Kabupaten Mempawah	
				1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelenggaraan pameran investasi			1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	-	-			
				1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.1 Penyelenggaraan Pameran			1 Paket	49,979,200	1 Paket	62,474,000	1 Paket	78,092,500	1 Paket	97,615,625	1 Paket	97,615,625		97,615,625			
				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal				70%		158,799,600	80%			100%		274,405,708	100%		274,405,708	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Mempawah
				1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyebarluasan informasi pelayanan terpadu				70%		-	80%			100%		-	100%		-		
				1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.1 Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem				70%		63,049,833	80%			100%		108,950,111	100%		108,950,111		
				1.2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1.2 Dokumen laporan				1 Dok		31,691,701	1 Dok			1 Dok		54,763,259	1 Dok		54,763,259		
				1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas /Insentif Daerah	1.3 Dokumen laporan				1 Dok		64,058,066	1 Dok			1 Dok		110,692,238	1 Dok		110,692,238		
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pengelolaan data informasi penanaman modal				1 Paket		20,000,000	1 Paket			1 Paket		20,000,000	1 Paket		20,000,000	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Mempawah
				1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya Jumlah Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota				1 Paket		-	1 Paket			1 Paket		-	1 Paket		-		
				1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.1 Persentase Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan				1 Paket		20,000,000	1 Paket			1 Paket		20,000,000	1 Paket		20,000,000		





**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat	
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		<b>Permendagri 90</b> <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b> 1. Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil  1.1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil, dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan teknologi	Persentase UMKM yang Berkembang  1. Bertambahnya Usaha Mikro  1.1 Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil  Tingkat Pengangguran				65 UMKM	200,000,000	70 UMKM	200,000,000	85 UMKM	200,000,000	85 UMKM	200,000,000	85 UMKM	200,000,000	Bidang Koperasi dan UKM	Kabupaten Mempawah
			01.15	<b>Permendagri 13</b> Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Jumlah UMKM Yang Aktif	70%	70%	215 Juta											Bidang Koperasi dan UKM	Kabupaten Mempawah
			01.15.06	1 Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM	1 Prosentasi Koordinasi & Pengembangan UKM	100%	100%	25 Juta												
			01.15.08	2 Fasilitasi pengembangan UMKM	2 Prosentasi pembinaan UKM	96%	100%	15 Juta												
			01.15...	3 Fasilitasi permasalahan proses produksi UMKM	3 Jumlah Fasilitasi Permasalahan UMKM yang di tangani	0 Kali	5 Kali	30 juta												
			01.15...	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM	0 Kali	20 Kali	25 juta												
			01.15...	5 Penyusunan database Usaha Mikro dan Kecil	5 Tersedianya database Usaha Mikro dan Kecil yang valid bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan	0%	UMKM	120 juta												
			01.17	<b>Permendagri 90</b> <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b> 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Sarana & Lahan (Pasar) Bagi Pengusaha Kecil Menengah  1 Jumlah sarana produk UMKM yang dibantu UMKM  2 Penyelenggaraan promosi produk UMKM	2 Kali  0 UMKM  2 Kali	3 Kali  100 UMKM  3 Kali	500 juta  300 juta  200 juta												
			01.17...	1 Pengembangan sarana prasarana produk UMKM	1 Jumlah sarana produk UMKM yang dibantu UMKM	0 UMKM	100 UMKM	300 juta												
			01.17.09	2 Penyelenggaraan promosi produk UMKM	2 Jumlah promosi Pemasaran Produk UMKM	2 Kali	3 Kali	200 juta												
				<b>Permendagri 90</b> <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b> 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UKM yang Dibina			70 UMKM	85,034,800	80 UMKM	127,552,200	90 UMKM	159,440,250	100 UMKM	199,300,313	100 UMKM	199,300,313	Bidang Koperasi dan UKM	Kabupaten Mempawah	
				1.1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.1 Database Para Pelaku Usaha Mikro			70 UMKM	16,034,800	80 UMKM	29,552,200	90 UMKM	46,440,250	100 UMKM	69,300,313	100 UMKM	69,300,313			
				1.2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1.2 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan UMKM			70 UMKM	15,000,000	80 UMKM	23,000,000	90 UMKM	28,000,000	100 UMKM	35,000,000	100 UMKM	35,000,000			
				1.3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	1.3 Jumlah Pelatihan Kepada pelaku wirasaha/UMKM			70 UMKM	30,000,000	80 UMKM	40,000,000	90 UMKM	45,000,000	100 UMKM	50,000,000	100 UMKM	50,000,000			
				1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam pemberdayaan Usaha Mikro	1.4 Jumlah Koordinasi Pengembangan UMKM			70 UMKM	24,000,000	80 UMKM	35,000,000	90 UMKM	40,000,000	100 UMKM	45,000,000	100 UMKM	45,000,000			



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat	
							target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Permendagri 050_5889																
				1.5 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.5 jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan			0		-		-		100,000,000		120,000,000	100 UKM	120,000,000		

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Mempawah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN RE -				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
					target	target	target	target	target
1	2	3	6	7	8	10	12	14	16
<b>Misi : Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien</b>									
1	Meningkatnya Tatakelola Pemerintah yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi	1 Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi	<p>Nilai Sakip</p> <p>1. Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</p> <p><b>Permendagri 13</b></p> <p>Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan</p> <p>1 Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik</p> <p>2 Jumlah kendaraan yang terpenuhi pemeliharaan dan perizinan</p> <p>3 Jumlah Material</p> <p>4 Jumlah Paket Alat Tulis Kantor</p> <p>5 Jumlah Paket Barang Cetak dan</p> <p>6 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik</p> <p>7 Jumlah jenis surat kabar/koran harian</p> <p>8 Jumlah paket Makanan &amp; Minuman Kantor</p> <p>9 Jumlah dokumen laporan, rekomendasi</p> <p>10 Jumlah dokumen laporan, rekomendasi</p> <p>11 Jumlah petugas keamanan dan ketertiban</p> <p>12 Jumlah petugas kebersihan kantor, alat kebersihan dan bahan pembersih</p> <p><b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <p>1 Jumlah Paket Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>2 Jumlah Kendaraan Roda 4 (empat)</p> <p>3 Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4</p> <p>4 Jumlah Paket Meubler</p> <p>5 Jumlah Unit Laptop/PC</p> <p>6 Pengadaan Paket Alat Studio &amp; Komunikasi</p> <p>7 Gedung Kantor yang terpelihara</p> <p>8 Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala</p> <p>9 Persentase Pemeliharaan Rutin / Berkala</p> <p>10 Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala</p> <p>11 Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer</p>	<p>0 Kec</p> <p>87%</p> <p>36</p> <p>3</p> <p>6.000=290br 3.000=300br</p> <p>1 Paket</p> <p>2 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1.000 exp</p> <p>2 Paket</p> <p>20 Laporan</p> <p>50 Laporan</p> <p>2 orang</p> <p>14 jenis</p> <p>100%</p> <p>3 Paket</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>5 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Unit</p> <p>16 Unit</p> <p>2 Unit</p> <p>PC : 9 unit Laptop:2 unit</p>	<p>9 Kec</p> <p>90%</p> <p>36</p> <p>7</p> <p>6.000=250br 3.000=300br</p> <p>1 Paket</p> <p>2 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1.000 exp</p> <p>2 Paket</p> <p>30 Laporan</p> <p>80 Laporan</p> <p>3 orang</p> <p>3org, 14 jenis</p> <p>100%</p> <p>3 Paket</p> <p>1 Unit</p> <p>4 Unit</p> <p>4 Paket</p> <p>4 Unit</p> <p>8 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Unit</p> <p>16 Unit</p> <p>2 Unit</p> <p>PC : 9 unit Laptop:2 unit</p>				

			<b>Terpenuhiya Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
			1 Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta	30 stel	35 stel				
			<b>Terciptanya Kompetensi Pegawai Dalam</b>	<b>8 Orang</b>	<b>14 Orang</b>				
			1 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti	8 Orang	14 Orang				
			<b>Terpenuhiya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
			1 Jumlah Laporan Capaian & Rkhtiar Realisasi Kinerja SKPD						
			2 Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3 dok	4 dok				
			3 Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok				
			4 Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1 dok	1 dok				
			<b>Terciptanya Keterbacaan Administrasi</b>						
			1 Jumlah Dokumen Laporan pengelolaan	6 dok	5 dok				
			<b>Terlaksananya Kegiatan Pameran</b>						
			1 Jumlah Kegiatan Kerjasama Informasi dan	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
				7 dok	7 dok				
			<b>Persentase Dokumen Arsip Daerah yang</b>						
			1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	<b>1 Kali</b>	<b>1 Kali</b>				
				1 Kali	1 Kali				
				<b>0%</b>	<b>80%</b>				
				0 Paket	4 Paket				
			<b>Permen dagri 90</b>						
			<b>Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>60 Dok</b>	<b>65 Dok</b>	<b>70 Dok</b>	<b>80 Dok</b>
			<b>1. Persentase penyelesaian laporan/dokumen tepat waktu</b>			<b>5 Dok</b>	<b>5 Dok</b>	<b>5 Dok</b>	<b>5 Dok</b>
			1.1 Jumlah dokumen perencanaan			2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
			1.2 Jumlah dokumen perencanaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			1.3 Jumlah dokumen perencanaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			1.4 Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			1.5 Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			1.6 Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			<b>2. Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran</b>						
			2.1 Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			2.2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100%	100%	100%	100%
						1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

			2.3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			2.4 Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			<b>3. Jumlah Pakaian Dinas SKPD</b>						
			3.1 Jumlah Pakaian dinas ASN			100%	100%	100%	100%
			3.2 Jumlah Kegiatan sosialisasi bagi pegawai dinas			100%	100%	100%	100%
			<b>4. Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah</b>						
			4.1 Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100%	100%	100%	100%
			4.2 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			100%	100%	100%	100%
			4.3 Jumlah Bahan Logistik Kantor			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			4.4 Jumlah cetakan dan penggandaan						
			4.5 Jumlah Pameran yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%
			4.6 jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			4.7 Jumlah Arsip Dinamis SKPD			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
			<b>5. Persentase Jasa Urusan Pemerintah daerah</b>						
			5.1 12 bulan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			5.2 Orang Bulan			100%	100%	100%	100%
			<b>6. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
			6.1 Jumlah roda 2 ,roda 4 ,BBM , perpanjangan STNK			100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%
			6.2 Jumlah roda 2 ,roda 4 ,BBM , perpanjangan STNK			100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%
			6.3 Gedung Kantor dan Taman			100%	100%	100%	100%
			6.4 Terlaksananya Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit PC di Kantor			100%	100%	100%	100%
			6.5 Jumlah Pemeliharaan meja ,lemari , meubel ,kursi , Ac, Komputer			100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%

Misi : Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah

1.	Meningkatkan Kemandirian Daerah sebagai Basis Perekonomian Daerah  1. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini  Meningkatnya investasi dan realisasi penanaman modal daerah guna menunjang ekonomi, sosial dan / manfaat lainnya  Permendagri 13 Jumlah Koperasi yang berkualitas 1 Jumlah Koperasi yang berbadan Hukum  2 Jumlah Koperasi Yang RAT dan Berkualitas 3 Prosentasi pengembangan jaringan kerjasama Koperasi 4 Jumlah Pengelolaan Koperasi 5 Jumlah Koperasi yang berbadan hukum  Tersedianya gambaran serta informasi peluang untuk berinvestasi 1 Persentase gambaran Pengembangan potensi unggulan daerah 2 Jumlah kegiatan koordinasi antar lembaga untuk mengendalikan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal 3 Jumlah potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk peluang berinvestasi 4 Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal 5 Jumlah kegiatan pameran investasi untuk berinvestasi  Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1 Jumlah/frekuensi kegiatan survey lapangan pelayanan, langsung di lapangan, pertemuan team teknis, rapat-rapat team teknis.  Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan 1 Jumlah Dokumen Izin Yang diterbitkan 2 Jumlah Pelayanan Perizinan Yang Diselenggarakan 3 Informasi Pelayanan Perizinan Yang Dapat Diserap Masyarakat (indikator di perjelas)	246 230  0 Koperasi 100% 15 0  75% 70% 8 Kali 50% 70%  2 Kali 0 Kec 0 Kec  80% 2500 Lembar 1 Paket 1 Paket	235 235  30 Kop 100% 20 Kali 9 Kec  80% 75% 8 Kali 55% 70%  2 Kali 9 Kec 9 Kec  80% 2700 Lbr 1 Paket 1 Paket					
----	--	---	---	---	--	--	--	--	--

			Meningkatnya efektifitas pengendalian dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	60%	65%				
			1. Persentase Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan	0%	50%				
			2. Jumlah pengendalian pelayanan perizinan						
			3. Presentas survey Kepuasan Masyarakat	20%	9 Kec				
			4. Jumlah kegiatan sosialisasi untuk peningkatan peran serta masyarakat	20%	50%				
			5. Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	20%	2 Kali				
			6. Jumlah dokumen standar pelayanan publik	0%	2 Kasus				
				0%	1 Dok				
			<b>Permendagri 90</b>						
			Capaian Koperasi Yang Dilakukan Pengawasan			20 Koperasi	30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi
			1. Laopran Tahunan Koperasi			20 Koperasi	30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi
			1.1. Persentase Kualitas Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro (LKM)			20 Koperasi	30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi
			1.2. Persentase Kepatuhan Koperasi sesuai dengan Peraturan yang ada			20 Koperasi	30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi
			Persentase Koperasi yang Dibina						
			1. Bertambahnya Peningkatan Kualitas dan Kesinambungan Jalannya Usaha Koperasi			20 Koperasi	30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi
			1.1. Bertambahnya Usaha Koperasi			20 Koperasi	30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi
						20 Koperasi	30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi
			Penyelenggaraan pameran investasi						
			1. Penyelenggaraan pameran investasi						
			1.1. Penyelenggaraan Pameran			50 Perusahaan	55 Perusahaan	70 Perusahaan	74 Perusahaan
						1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
						1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

			<p><b>Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal</b></p> <p>1. Penyebarluasan informasi pelayanan terpadu</p> <p>1.1 Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem</p> <p>1.2 Dokumen laporan</p> <p>1.3 Dokumen laporan</p> <p><b>Persentase pengelolaan data informasi penanaman modal</b></p> <p>1. Meningkatnya Jumlah Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota</p> <p>1.1 Persentase Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan</p>			70%	80%	90%	100%
						70%	80%	90%	100%
						1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
						1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
						1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
						1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
						1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

**Misi : Memperkuat Basis Perekonomian Daerah melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata**

1.	Meningkatnya Daya Saing Daerah melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah	1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	<p>Rasio PAD Terhadap APBD</p> <p><b>Permendagri 13</b></p> <p>Terciptanya Iklim Investasi yang kompetitif</p> <p>1 Presentase kajian sumberdaya dan potensi untuk berinvestasi</p> <p>2 Jumlah potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk peluang berinvestasi</p> <p>3 Presentase gambaran potensi daerah perencanaan investasi</p> <p>4 Presentase informasi dan data perkembangan penanaman modal</p>						
						75%	75%		
						25%	25%		
						60%	60%		
						75%	75%		
						75%	75%		

			<b>Permendagri 90</b> Data potensi investasi 1. Data potensi investasi 1.1 Data potensi investasi <b>Persentase Investasi Asing dan Lokal yang Dibina</b> 1. Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 1.1 Data Realisasi Penanaman Modal (Dokumen)  <b>PDRB PERKAPITA</b>			50 1 Dok 1 Dok 55 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan	60 1 Dok 1 Dok 60 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan	65 1 Dok 1 Dok 70 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan	70 1 Dok 1 Dok 74 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Perusahaan
	2. Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah			2 Kali 0 UMRM 2 Kali	3 Kali 100 UMRM 3 Kali				
			<b>Permendagri 13</b> Jumlah Sarana & Lahan (Pasar) Bagi 1 Jumlah sarana produk UMKM yang dibantu 2 Jumlah promosi Pemasaran Produk UMKM			65 URM 70 URM	70 URM 80 URM	85 URM 90 URM	85 URM 100 URM
			<b>Permendagri 90</b> <b>Persentase UMKM yang Berkembang</b> 1. Bertambahnya Usaha Mikro 1.1 Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil  Tingkat Pengangguran	70% 100% 96% 0 Kali 0 Kali	70% 100% 100% 5 Kali 20 Kali UMKM	70 URM	80 URM	90 URM	100 URM
	3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		<b>Permendagri 13</b> <b>Jumlah UMKM Yang Aktif</b> 1 Prosentasi Koordinasi & Pengembangan UMK 2 Prosentasi pembinaan UMK 3 Jumlah Fasilitasi Permasalahan UMKM yang di tangani 4 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM 5 Tersedianya database Usaha Mikro dan Kecil yang valid bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan	0%					



			<b>Jumlah Sarana &amp; Lahan (Pasar) Bagi Pengusaha Kecil Menengah</b> 1 Jumlah sarana produk UMKM yang dibantu 2 Jumlah promosi Pemasaran Produk UMKM	2 Kali 0 UMKM 2 Kali	3 Kali 100 UMKM 3 Kali				
			<b>Permendagri 90</b> <b>Persentase UKM yang Dibina</b>  <b>1. Persentase Pembinaan Pendataan dan Pengembangan Usaha Mikro</b>  1.1 Database Para Pelaku Usaha Mikro  1.2 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan UMKM 1.3 Jumlah Pelatihan Kepada pelaku wirausaha/UMKM 1.4 Jumlah Koordinasi Pengembangan UMKM			70 UKM 70 UKM 70 UKM 70 UKM	80 UKM 80 UKM 80 UKM 80 UKM	90 UKM 90 UKM 90 UKM 90 UKM	100 UKM 100 UKM 100 UKM 100 UKM



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah  
Tahun Anggaran 2020 - 2024

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah kegiatan utk fasilitasi pelayanan perizinan	0 Kecamatan	9 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec
2	Tersebarluasnya informasi pelayanan perizinan	0 Kecamatan	9 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec
3	Persentase informasi pelayan perizinan yang dapat di serap masyarakat	80%	83%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Jumlah dokumen izin yg diterbitkan	2500 lembar	2700 lbr	2900 lbr	3100 lbr	3300 lbr	3500 lbr	3500 lbr
5	Jml pelayanan yg diselenggarakan	1 paket	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt
6	Terciptanya pengendalian pelayanan yg efektif dan efisien bidang pelayanan perizinan	0%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
7	Meningkatnya pelayanan teknologi informasi yang efektif bidang	0%	50%	60%	70%	80%	90%	90%



	elayanan perizinan							
8	Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	87%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
9	Meningkatnya Saranan dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terciptanya Kompetensi Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi	8 orang	14 orang	15 orang	17 orang	19 orang	20 orang	20 orang
11	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Terciptanya Ketertiban Administrasi dan Manajemen Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Terlaksananya Kegiatan Pameran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase Dokumen Arsip Daerah yang terselamatkan	0%	80%	85%	87%	90%	95%	95%
15	Meningkatnya jumlah PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya di daerah	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
16	Meningkatnya kualitas UMKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah tahun 2020 – 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA SKPD.

RENSTRA ini dibuat sebagai acuan 5 (lima) tahun kedepan dalam menjabarkan potret Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, dimana didalamnya tertuang tujuan, sasaran dan program serta indikator yang akan dicapai dan dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Renstra dapat digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan bagi Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), RKA dan DPA.

Demikian RENSTRA Tahun 2020-2024 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah

  
**NURMALA, SH, M.Si**  
NIP. 19680522 199403 21006